

**RANCANGAN STRATEGI PENGUATAN TRANSAKSI QRIS PADA
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat S2

Program Studi Manajemen



Disusun oleh:

Anggie Andeta

NIM.20402300091

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**RANCANGAN STRATEGI PENGUATAN TRANSAKSI QRIS
PADA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh:

Anggie Andeta

20402300091

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan Sidang Panitia Ujian Tesis
Program Studi Magister Manajemen Fakultas ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 21 Agustus 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. Mulyana, S.E.,M.Si.

NIK. 210490020

**RANCANGAN STRATEGI PENGUATAN TRANSAKSI QRIS
PADA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG**


Disusun Oleh:

**Anggie Andeta
NIM.20402300091**

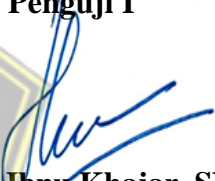
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing


Prof. Dr. Drs. Mulvana, SE, M.Si
NIK. 210490020

Penguji I


Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si
NIK. 210491028

Penguji II


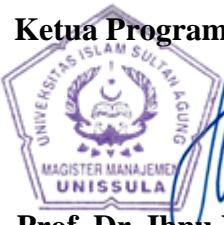

Dr. Lutfi Nurcholis, ST, SE, MM
NIK.210416055

Telah ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen

Tanggal 26 Agustus 2024

Ketua Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, Msi
NIK.210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angie Andeta
NIM : 20402300091
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ **Rancangan Strategi Penguatan Transaksi QRIS pada Retribusi Parkir di Kota Semarang** ” merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Penulis siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.



LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggie Andeta
NIM : 20402300091
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul :

RANCANGAN STRATEGI PENGUATAN TRANSAKSI QRIS PADA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Anggie Andeta
NIM. 20402300091

ABSTRAK

RANCANGAN STRATEGI PENGUATAN TRANSAKSI QRIS PADA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG

Tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu mengatur dan menjagamekanisme sistem keuangan agar tetap stabil baik tunai maupun non tunai. Terdapat beberapa opsi bertransaksi secara *cashless* diantaranya melakukan pembayaran dengankartu, transfer bank dan QRIS. QRIS diharapkan bisa membantu pemda untuk meningkatkan pendapatan dan hal ini dilakukan demi mencegah kebocoran dan *governance*, salah satu pendapatan berasal dari juru parkir. Implementasi penggunaan QRIS dilapangan masih sedikit dan banyak juru parkir yang belum terbiasa dengan penggunaan QRIS. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu mengidentifikasi strategi yang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam retribusi parkir di Kota Semarang melalui kanal QRIS.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan analisis SWOT. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Dinas Perhubungan Kota Semarang Bidang Parkir, dan KPwBI Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini sehubungan dengan perumusan masalah adalah rencana untuk mendorong optimalisasi penggunaan QRIS pada retribusi parkir di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang diantaranya yaitu penerapan QRIS pada Pemda terkait dengan retribusi parkir memiliki peluang besar dalam penerapan digitalisasi pembayaran dan mampu mengurangi terjadinya kebocoran sehingga meningkatkan Pendapatan Daerah Pemda. Disamping itu terdapat kelemahan dan penerapan digitalisasi dalam penerapan transaksi digital ini seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang siap terutama untuk juru parkir dan masyarakat awam dan menjalankan layanan QRIS sangat maraknya kejahatan di dunia teknologi (*cybercrime*).

Kunci: SWOT, Juru Parkir, QRIS dan PAD

ABSTRACT

Bank Indonesia in the payment system regulates and maintains the financial system mechanism to remain stable, both cash and non-cash. There are several cashless transaction options, including making payments by card, bank transfer and QRIS. QRIS is expected to help local governments increase revenue and this is done to prevent leakage and governance, one of the revenues comes from parking attendants. The implementation of the use of QRIS in the field is still minimal and many parking attendants are not yet familiar with the use of QRIS. Based on the description above, this study has the main objective of identifying effective strategies in increasing Regional Original Income (PAD), especially in parking fees in the City of Semarang through the QRIS channel.

The research method used in this study is a qualitative approach with a case study approach using SWOT analysis. The subjects studied in this study include the Semarang City Transportation Agency for Parking, and the Bank Indonesia Representative Office for Central Java Province. Meanwhile, the object of this study in relation to the formulation of the problem is the plan to encourage the optimization of the use of QRIS in parking fees in Semarang City.

In this study, conclusions can be drawn, including the implementation of QRIS in the Regional Government related to parking fees has great opportunities in the implementation of payment digitalization and is able to reduce leakage, thereby increasing Regional Income Government. In addition, there are weaknesses and the implementation of digitalization in the implementation of this digital transaction such as the lack of Human Resources who are ready, especially for parking attendants and the general public and running QRIS services, the rampant crime in the world of technology (cybercrime).

Key: SWOT, Parking Attendants, QRIS and PAD

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya karena perkenan dan RidhoNya, penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan yang ditargetkan.

Selama proses pembuatan tesis ini, banyak dukungan, bantuan dan bimbingan yang diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyو, S.E, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Unissula.
2. Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula.
3. Prof. Dr. Drs. Mulyana, S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sangat baik, memberikan arahan, saran dan masukan dalam menyusun dan menyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Kedua orang tua, suami dan anak yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaiknya.
5. Dinas Perhubungan Kota Semarang.
6. Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Semoga apa yang telah diberikan tercatat sebagai amal sholeh dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat dilaksanakan, memberikan manfaat bagi perkembangan ilmupengetahuan.

Semarang, 26 Agustus 2024

Penulis,



Angie Andeta

DAFTAR ISI

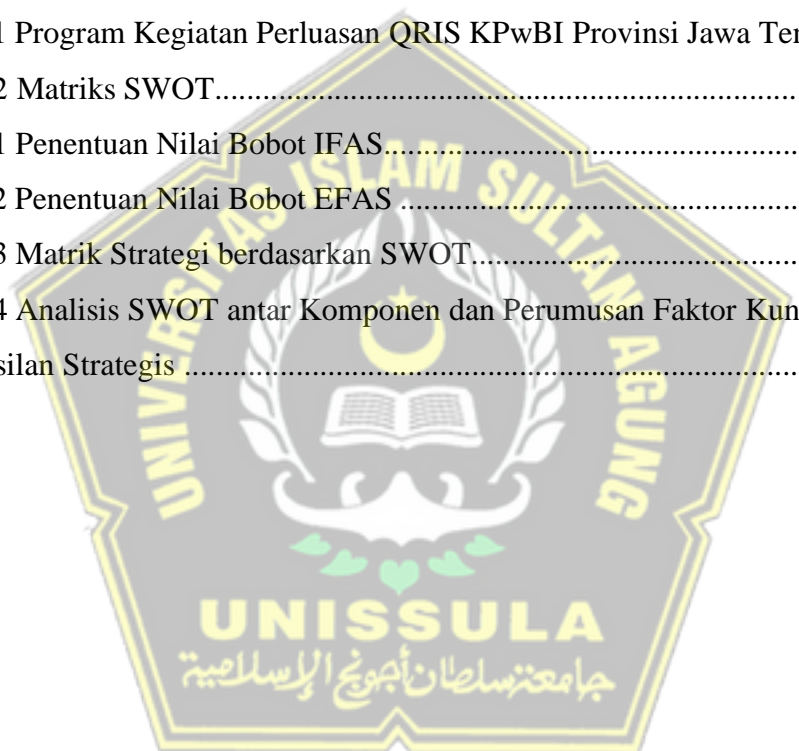
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
2.1 Kerangka Berpikir	12
2.2 Tinjauan Pustaka	13
2.3. Kajian Teori	15
2.3.1 Teori Tentang Strategi.....	15
2.3.2 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).....	21
2.2.3 Analisis SWOT	31
2.2.4 Faktor-faktor dalam Analisis SWOT	32
2.2.5 Fungsi dan Peran Bank Indonesia dalam Elektronifikasi Pembayaran.....	35
2.2.7 Elektronifikasi Pemerintah Daerah	37
2.2.7 Peran dan kebijakan BI dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran digital	43
2.2.8 Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	46
3.1 Metode Penelitian.....	54
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	56
3.3 Teknik Penentuan Informan	56
3.4. Tahap-Tahap Penelitian	57
3.5 Teknis Pengumpulan Data	58
3.6 Teknik Analisis Data	61
3.7 Analisis Matrik SWOT	63

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Bank Indonesia.....	69
4.1.1 Status Bank Indonesia	69
4.1.2. Tugas Bank Indonesia	70
4.1.3 Tujuan Bank Indonesia.....	70
4.1.4. Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia.....	71
4.2 Analisis Faktor Strategis Internal dan Faktor Strategis Eksternal QRIS sebagai Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Semarang.....	73
4.2.1 Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)	73
4.2.2 Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS).....	75
4.2.3 Menentukan Matriks EFAS dan IFAS	76
4.3 Matrik Analisis SWOT.....	79
4.3.1 Matrik Internal – Eksternal (IE).....	80
4.3.2 Matriks kuadran SWOT	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	90



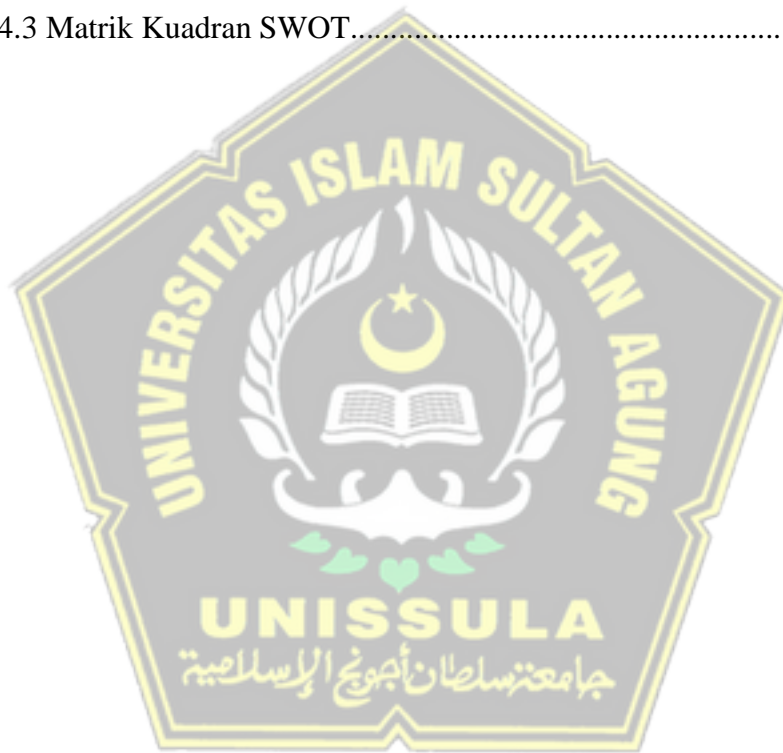
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengguna Baru dan Volume Transaksi QRIS tahun 2023	8
Tabel 1.2 Data Realisasi Pajak dan Retribusi per Kab/Kota di Wilayah Kerja BI Jateng.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Program Kegiatan Perluasan QRIS KPwBI Provinsi Jawa Tengah ...	20
Tabel 3.2 Matriks SWOT.....	65
Tabel 4.1 Penentuan Nilai Bobot IFAS.....	78
Tabel 4.2 Penentuan Nilai Bobot EFAS	79
Tabel 4.3 Matrik Strategi berdasarkan SWOT.....	81
Tabel 4.4 Analisis SWOT antar Komponen dan Perumusan Faktor Kunci Keberhasilan Strategis	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	12
Gambar 4.1 Tiga pilar Utama BI.....	71
Gambar 4.2 Matrik internal eksternal (IE)	80
Gambar 4.3 Matrik Kuadran SWOT.....	81



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Uang” merupakan kata paling familiar dan paling mudah dicerna oleh berbagai kalangan di berbagai pelosok negeri. Uang menjadi simbol ekonomi yang paling dicari. Hampir setiap aktivitas manusia yang dilakukan pasti memiliki motif ekonomi yang pada akhirnya dapat dikorelasikan dengan transaksi nilai uang. Jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter yaitu, pertukaran barang dan/ atau jasa untuk barang dan/atau jasa yang diinginkan. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang yang ingin bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya. Apalagi jika salah satunya tidak terlalu butuh dengan hal yang akan ditukar. Akhirnya sistem barter ini digantikan dengan *commodity currency*, masih sama-sama menggunakan barang namun barang tersebut harus yang sudah diterima secara umum sebagai media pertukaran maupun sebagai suatu standard nilai yang digunakan dalam pertukaran barang oleh masyarakat. Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan tidak efisiennya penggunaan barter maupun uang komoditas, masyarakat mengembangkan alat tukar yang lebih efisien dan terukur yaitu uang. Bentuk uang juga terus berevolusi dari sejak awal kemunculannya. Yang pertama

adalah uang kartal, bentuk uang kartal yang kita kenal ada dua macam yaitu uang logam dan uang kertas, uang kartal biasa kita sebut dengan uang tunai.

Di Indonesia bentuk uang kartal sudah digunakan sejak zaman penjajahan. Pada masa jaman penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC dalam bentuk koin dan kertas. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang, mereka menerbitkan uang koin dan kertas versi pemerintah Jepang. Uang koin pada masa ini dibuat menggunakan aluminium dan timah. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah Indonesia merasa perlu menerbitkan uang sendiri yang disebut sebagai ORI (Oeang Republik Indonesia). Penerbitan ini sebagai lambang identitas kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. (Andriani at al., 2022)

Dengan adanya perkembangan teknologi dan inovasi, hal ini juga menggeser tatacara pemakaian uang dalam sistem pembayaran/transaksi di kehidupan manusia. Perkembangan tersebut mengubah cara manusia melakukan proses transaksi. Inovasi dan perubahan ini membuat masyarakat tak perlu membawa uang kartal yang penuh sesak memadati dompetnya, cukup dengan kartu tipis bernama kartu debit atau kartu kredit dan bahkan kini masyarakat cukup memakai gawai pintar mereka untuk melakukan transaksi.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki hak dan wewenang dalam perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu mengatur dan menjaga mekanisme sistem keuangan agar tetap stabil baik tunai maupun non tunai. Pada sistem pembayaran tunai, Bank

Indonesia bertanggungjawab atas pengeluaran dan peredaran uang tunai kepada masyarakat. Namun, seiring waktu penggunaan nilai transaksi pembayaran tunai menimbulkan banyak permasalahan dan kelemahan. Sehingga dibutuhkan inovasi sistem pembayaran yang mampu menjawab permasalahan dan membenahi kelemahan dari sistem pembayaran tunai. Oleh karena itu, pembayaran non tunai tercipta sebagai wujud inovasi lebih lanjut pada sistem keuangan yang lebih efisien. Sebagai contoh, pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memberikan nilai tambah pada nasabah membuat bergesernya sistem pelayanan di bank. Bank dalam melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan kepada nasabah, telah berevolusi dari model konvensional *face to face* dan didasarkan pada *paper document* ke model layanan dengan *non face to face* dan digital (Rachmadi Usman, 2007). Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya berbagai inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi (Mintarsih, 2013).

Penetrasi penggunaan *smartphone* sejak tahun 2010 membantu kemajuan layanan pembayaran melalui telepon genggam di Indonesia. Peningkatan sistem operasi ditambah dengan keandalan konektivitas internet memungkinkan transformasi layanan pembayaran seluler. Tingginya penggunaan *smartphone* memunculkan metode pembayaran seluler berbasis aplikasi. Internet sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia, menurut Riset We Are Social dan Hootsuite soal

internet Indonesia tahun 2023 sebanyak 77% dari total populasi penduduk Indonesia sudah menggunakan internet atau setara dengan 212,9 juta penduduk.

Dengan adanya faktor tersebut diatas, munculah kemudian sistem pembayaran baru, pembayaran digital atau sistem pembayaran non tunai. Di Indonesia, budaya *cashless* sedang berkembang dan mulai populer di kalangan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. GNNT juga diharapkan mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi dimana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian, dapat meningkatkan efektivitas transaksi yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau *human error*. Pada gilirannya GNNT akan dapat mewujudkan ekosistem *cashless society*. Seiring dengan upaya meningkatkan GNNT, BI menyadari bahwa sistem pembayaran perlu beradaptasi dengan hadirnya teknologi digital.

Bank Indonesia (BI) menyebutkan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers menyatakan bahwa pada tahun 2023, nilai transaksi digital banking tercatat Rp58.478,24 triliun atau tumbuh sebesar 13,48 persen (yoy) (www.antaranews.com). Ia memperkirakan

nilai transaksi digital banking juga diproyeksikan meningkat 9,11 persen secara *year on year* (yoy) hingga mencapai Rp63.803,77 triliun pada 2024. Sedangkan nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 43,45 persen (yoy) sehingga mencapai Rp835,84 triliun dan diproyeksikan meningkat 25,77 persen (yoy) hingga mencapai Rp1.051,24 triliun pada 2024. Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 130,01 persen (yoy) dan mencapai Rp229,96 triliun, dengan jumlah pengguna 45,78 juta dan jumlah merchant 30,41 juta yang sebagian besar merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Terdapat beberapa opsi bertransaksi secara *cashless* diantaranya melakukan pembayaran dengan kartu, transfer bank dan QRIS. Ibarat gayung bersambut, selama pandemi terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan layanan digital, karena minimalisir tatap muka untuk bertransaksi. Inilah salah satu *booster* era digital mulai lebih dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya kondisi pandemik, masyarakat “dipaksa” agar beralih ke penggunaan transaksi digital.

Di Indonesia, banyak aplikasi dompet digital yang terkenal dilingkungan masyarakat diantaranya OVO, Go-Pay, Dana, Doku, LinkAja, Shopeepay dan lainnya. Manfaat dalam penggunaan dompet digital antara lain praktis, nyaman, serta aman dalam pembayarannya. Mekanisme pembayaran dengan dompet digital sangat mudah, hanya dilakukan hanya dengan beberapa tahapan sederhana saja sampai bukti transaksinya pun bisa dilihat di riwayat transaksi pada aplikasi tersebut.

Bank Indonesia mencatat setidaknya Rp3,5 triliun harus dialokasikan setiap tahun untuk biaya pencetakan dan pendistribusian uang kartal di seluruh Indonesia (<https://www.kompasiana.com/2023>). Jumlah yang cukup banyak untuk dapat memenuhi kecukupan peredaran uang sebagai alat tukar transaksi. Meski begitu, transaksi nontunai bukanlah pengganti sistem pembayaran tunai, melainkan keduanya saling melengkapi. Dalam rangka mendukung pembayaran digital, BI merilis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar kode QR nasional. QRIS menjadi terobosan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BI sebagai regulator bersama Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI). Selain memperluas pembayaran nontunai di seluruh negeri secara lebih efisien, QRIS memungkinkan ekosistem digital (*ecommerce*, *fintech*, dan bank) untuk saling terhubung dengan lebih baik (Puspitasari & Salehudin, 2022). Dengan ekosistem digital ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah karena ekosistem digital akan meningkatkan efisiensi waktu, kinerja, serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki hingga dapat mencapai target bisnis dan manfaat para pelaku usaha dan konsumen.

Peluncuran QRIS menasar pelaku usaha dan masyarakat umum sebagai target penggunaannya. Sebagaimana keterangan Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, UMKM memang menjadi sasaran utama penggunaan QRIS karena jumlahnya besar.

Tahun 2021, Bank Indonesia menargetkan 12 juta merchant yang menggunakan QRIS dapat dicapai. KPwBI Provinsi Jawa Tengah mendapatkan mandat untuk dapat mencapai 1.039.900 Merchant QRIS. Pada akhir tahun, target merchant QRIS tersebut dapat kami raih. Tahun 2022, BI memiliki misi penambahan 15 juta pengguna QRIS di seluruh Indonesia. KPwBI Provinsi Jawa Tengah mendapatkan jatah target penambahan pengguna QRIS sebanyak 2.163.000 pengguna hingga akhir 2022, dan alhasil dapat terpenuhi pada Desember 2022. Target yang ingin diraih terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2023, KPwBI Provinsi Jawa Tengah mendapatkan mandat untuk dapat mencapai target 2,3 juta pengguna baru dan 70,5 juta kali transaksi QRIS harus dicapai. Dengan berbagai usaha ditempuh untuk meraih target yang telah ditetapkan. Dan pada akhir tahun 2023, KPwBI Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai target tersebut dengan tepat waktu. Pada tahun ini, target yang harus dicapai yaitu 53,3 juta volume transaksi dan 1,87 juta pengguna baru.

Menurut data yang diperoleh dari Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran – Kantor Pusat Bank Indonesia, berikut data pengguna baru QRIS dan volume transaksi QRIS tahun 2023:

Tabel 1.1

Data Pengguna Baru dan Volume Transaksi QRIS Tahun 2023

Bulan	Volume	Nominal (Rp)	Pengguna Baru
Januari	7,017,676	638,464,194,606	3,1
Februari	6,881,843	629,393,186,246	
Maret	7,296,767	688,279,681,849	
April	5,352,132	774,551,189,2	
Mei	8,173,169	722,356	
Juni	7,305,162	71	
Juli	8,332,097		
Agustus	7,710,1		
September	8		
Oktober			
Novemb			
De			

Selain sebagai media untuk transaksi pembayaran ritel, QRIS juga dapat digunakan untuk transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pembayaran tersebut berujung pada perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah merasa perlu menambah media penerimaan pajak dan retribusi yang semula hanya dapat menerima tunai, diperluas dengan non tunai. Hal ini dilakukan demi mencegah kebocoran dan *governance*.

Salah satu upaya untuk menguatkan digitalisasi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.555.1/06 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam struktur TP2DD tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai Wakil Ketua I yang bertugas diantaranya mendukung digitalisasi, menyelenggarakan sosialisasi

penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat. Adapun pembentukan TP2DD ini juga dilakukan oleh 17 Kab/Kota lainnya yang merupakan wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah.

Implementasi penerapan pajak dan retribusi daerah melalui kanal QRIS yang dirasa cukup berhasil yaitu pada Kota Semarang. Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi parkir, retribusi pasar dan transportasi. Sebagai regulator dan anggota TP2DD, Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung peningkatan transaksi QRIS pemerintah daerah, diantaranya melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan memberikan insentif kepada sejumlah pengguna jalan yang membayar parkir dengan menggunakan QRIS. Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah juga memberikan insentif minuman kemasan kepada pengguna transportasi umum Trans Jawa Tengah yang membayar tiket dengan menggunakan QRIS. Selama periode program tersebut, terdapat peningkatan jumlah volume transaksi penggunaan QRIS. Pada akhirnya, diharapkan masyarakat akan terbiasa dalam menggunakan QRIS untuk bertransaksi sehari-hari.

Tabel 1.2

Data Realisasi Pajak dan Retribusi per Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja BI Jawa Tengah

No	Pemerintah Daerah	Target Pajak	Realisasi Pajak	Realisasi Pajak Per Kanal		Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Realisasi Retribusi Per Kanal	
				QRIS	NON QRIS			QRIS	NON QRIS
1	Provinsi Jawa Tengah	15,471,102,880,000	5,673,801,508,934	-	5,673,801,508,934	1,678,236,270,000	891,620,432,233	-	891,620,432,233
2	Kota Magelang	15,471,102,880,000	5,673,801,508,934	-	5,673,801,508,934	1,678,236,270,000	891,620,432,233	-	891,620,432,233
3	Kota Salatiga	53,307,000,000	21,004,185,924	1,559,274	21,002,626,650	237,063,569,455	112,318,710,223	2,925,000	112,315,785,223
4	Kota Semarang	75,149,500,000	117,087,224,318	123,144,200	30,705,778,221	15,073,685,164	5,350,877,896	-	5,350,877,896
5	Kabupaten Blora	2,389,028,620,494	897,995,078,547	6,010,757,828	891,984,320,719	219,859,266,726	34,870,684,443	3,339,063,156	52,420,681,805
6	Kabupaten Demak	69,450,000,000	39,425,303,106	29,215,853	39,396,087,253	211,879,000,000	95,385,379,872	62,000	2,865,712,211
7	Kabupaten Grobogan	181,775,343,575	63,325,834,600	311,157,993	62,949,443,519	25,675,296,800	8,042,432,797	-	8,042,432,797
8	Kabupaten Jepara	146,200,000,000	55,586,092,314	550,000	20,920,961,928	11,689,462,000	5,352,735,819	-	3,432,559,044
9	Kabupaten Kebumen	205,717,192,000	68,189,238,258	7,676,870	68,181,561,388	227,356,498,000	73,186,835,891	-	73,186,835,891
10	Kabupaten Kendal	134,680,000,000	61,652,620,080	94,499,352	40,668,280,042	37,950,555,000	11,978,748,131	660	9,572,075,989
11	Kabupaten Kudus	275,496,820,469	72,250,835,315	208,862,267	72,041,973,048	26,865,397,474	7,908,046,259	115,286,392	7,792,759,867
12	Kabupaten Magelang	181,448,112,000	71,612,951,702	10,195,218	71,602,756,484	229,537,647,000	107,108,085,535	-	107,108,085,535
13	Kabupaten Pati	173,916,518,657	80,158,161,333	88,881,214	80,069,280,119	241,292,922,730	7,369,328,584	-	7,369,328,584
14	Kabupaten Purworejo	129,657,956,000	46,937,739,154	359,837,713	46,298,114,330	203,089,978,000	12,397,388,599	-	4,459,459,307
15	Kabupaten Rembang	108,888,556,465	34,259,608,806	247,126,749	34,012,482,057	277,456,232,842	110,885,617,062	16,535,880	110,869,081,182
16	Kabupaten Semarang	143,016,000,000	36,872,071,449	21,117,918	36,850,860,260	33,203,500,000	5,603,010,557	-	5,603,010,557
17	Kabupaten Temanggung	298,998,057,000	85,442,878,004	-	85,442,878,004	208,054,336,000	64,531,566,679	-	64,531,566,679
18	Kabupaten Wonosobo	76,510,647,700	18,669,104,308	66,590,237	18,602,514,071	11,264,340,000	2,928,810,124	-	2,704,852,324

Sumber data: <https://kelola.p2dd.go.id/>

Berkaca pada kondisi dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, potensi penggunaan QRIS pada penerimaan daerah masih sangat besar, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Rancangan Strategi Penguatan Transaksi QRIS retribusi parkir yang diterapkan KPwBI Jawa Tengah yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dalam retribusi parkir di kota Semarang melalui kanal QRIS.

1.3 Tujuan Penelitian

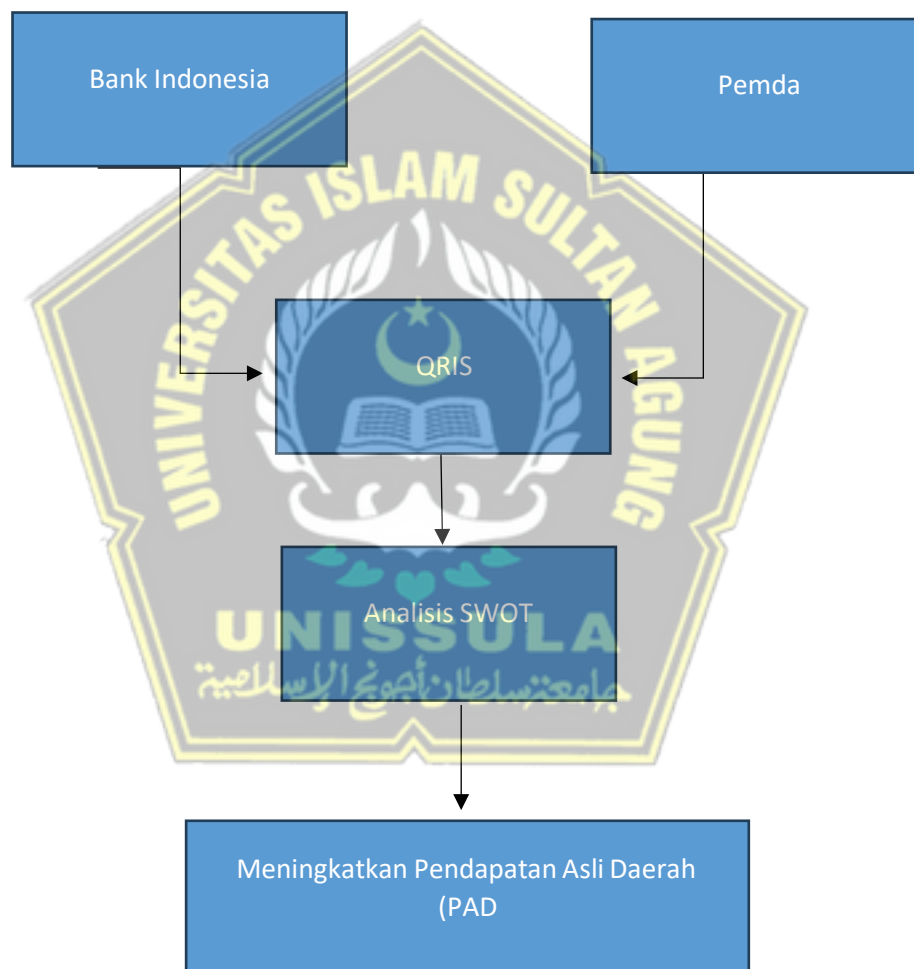
Berdasarkan uraian di atas penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu mengidentifikasi strategi yang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam retribusi parkir di Kota Semarang melalui kanal QRIS.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dibuat sebagai referensi bagi peneliti lain, khususnya bagi civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan implementasi QRIS pada retribusi parkir di Kabupaten/Kota lain.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai pengetahuan bagi pembaca tentang proses peningkatan PAD melalui retribusi parkir di Kota Semarang melalui kanal QRIS.
3. Sebagai media referensi bagi Pemda dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk meningkatkan penggunaan QRIS.

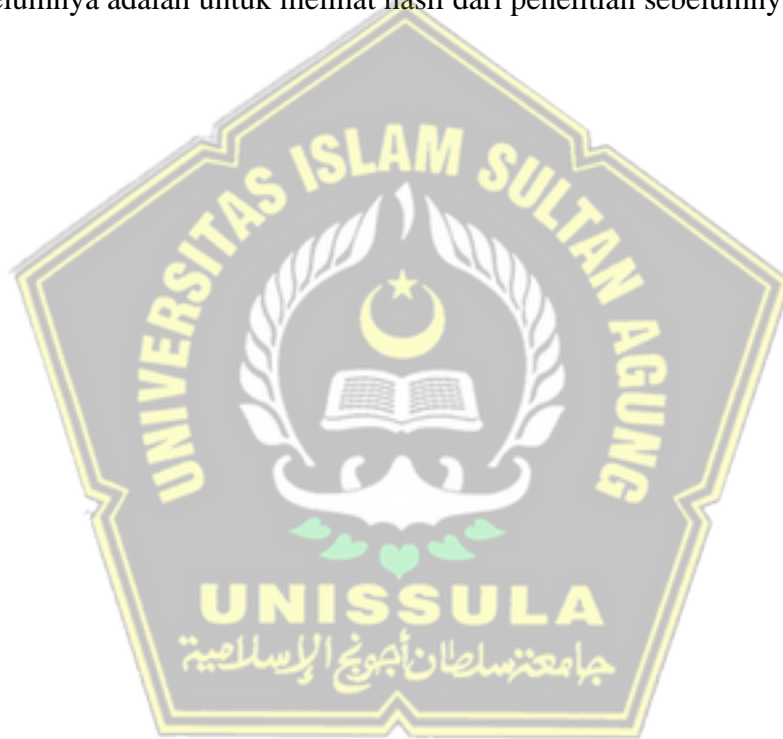
BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kerangka Berpikir



2.2 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, beberapa penelitian terdahulu yang dapat membantu untuk melihat perkembangan suatu objek penelitian tertentu dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini. Tujuan peneliti dari penelitian sebelumnya adalah untuk melihat hasil dari penelitian sebelumnya.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Kesimpulan
1.	Analisis Minat Pengguna Fitur QRIS Sebagai Media Pembayaran Pajak PBB Online (FINTECH) Menggunakan Teori Difusi Inovasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Bandung)	Bella Lulu Sofania, Palti MT Sitorus	2023	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial variabel keunggulan relatif terhadap minat mengadopsi wajib pajak di Kota Bandung untuk mengadopsi fitur QRIS sebagai media pembayaran pajak PBB secara online
2.	Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai melalui Penerapan QRIS dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta	Mela Asoka Anggraeni dan Argo Pambudi	2024	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan QRIS telah dilakukan dengan penetapan standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi yang mendukung kebijakan, komunikasi antar organisasi yang berjalan baik serta adanya disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan yang melakukan kewenangan sesuai dengan aturan
3.	Analisa Pengaruh Manfaat , Kemudahan Penggunaan, dan resiko terhadap Keputusan Menggunakan QRIS sebagai alat Pembayaran pada Usaha Mikro di Kabupaten Pacitan	Nur Khofifah	2023	Variabel kemudahan dan manfaat berpengaruh terhadap keputusan menggunakan QRIS

4.	Fenomena Penggunaan QRIS dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045	Amelia Putri Darwiyani, Anya Ahda Mahira, Merry Maharani	2023	Penggunaan QRIS yang efisien ini turut serta dalam pembangunan ekonomi kreatif menuju Indonesia emas 2045. Dimana Indonesia emas 2045 menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar dan berkarya di segala bidang
5.	Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS)	Ali Ihsan	2020	Kebijakan Bank Indonesia KPw Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi QRIS berdasarkan lima tolak ukur yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh dapat disimpulkan efektif

2.3. Kajian Teori

2.3.1 Teori Tentang Strategi

Setiap organisasi atau perusahaan harus memiliki strategi dalam mencapai suatu tujuan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. (Ardiansyah dan Hasanah, 2019). Menurut Glueck dan Jauch dalam Riyans Ardiyansyah dan Nurjannatul Hasanah strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Sementara mudahnya strategi didefinisikan sebagai cara atau bisa juga metode yang dipakai oleh seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi mencapai suatu tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan dan sumber daya. Strategi disusun dengan perencanaan-perencanaan organisasi dengan tahapan berupa analisis lingkungan internal dan eksternal (Sigit Hermawan dan Sriyono, 2020).

Dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis (Rangkuti, 2013) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya :

1. Chandler : Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
2. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth : Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
3. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner : Strategi merupakan respons secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
4. Porter : Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

5. Andrews, Chaffe : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
6. Hamel dan Prahalad : Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di Masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan dalam persaingan dengan melihat faktor eksternal dan internal realitas di perusahaan. Atas Hal Tersebut Perusahaan melakukan Perencanaan dan Tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

Strategi yang menyeluruh atau dikenal dengan strategi yang mengedepan integrasi. Strategi ini dilakukan untuk berbagai konteks hubungan dengan konsumen maupun stakeholder lainnya. a. Strategi yang berhubungan dengan pemasok, distributor atau agen, strategi menghadapi konsumen, strategi

menghadapi pesaing dan lain sebagainya, b. Strategi yang intensif dan fokus pada masalah yang dihadapi. Biasanya strategi ini digunakan untuk peluncuran produk-produk baru, melakukan penetrasi pasar dan memengaruhi konsumennya, c. Strategi diversifikasi atas produk. Strategi yang digunakan dengan pengembangan produk yang dihasilkan perusahaan, d. Strategi defensif, yang biasanya dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya yang terlalu besar pada operasional perusahaan. Jika perusahaan mulai mengalami kemunduran, strategi ini seringkali digunakan untuk mengatasi masalah yang ada (Bambang D Prasetyo dan Nufian S Febrianti, 2020)

Wheelen dan Hunger mengemukakan ada tiga tingkatan dalam strategi untuk perusahaan besar yaitu

- a. Strategi Korporasi (*Corporate strategy*) merupakan strategi yang mencerminkan seluruh perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan serta keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis produk. Ada tiga jenis strategi yang dapat dipakai pada tingkat strategi ini yaitu strategi pertumbuhan (*Growth Strategy*), Strategi Stabilitas (*Stability Strategy*), *Retrenchment Strategy*.
- b. Strategi Bisnis (*Business Startegy*) merupakan strategi yang digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbankkan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. Terdapat tiga macam strategi yang bisa digunakan pada

strategi tingkat bisnis yaitu strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, strategi fokus.

- c. Strategi fungsional (*functional strategy*) digunakan pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mengacu pada dua tingkatan strategi sebelumnya yaitu strategi korporasi dan strategi bisnis. Strategi fungsional juga disebut sebagai *value-based strategy*. Berfokus pada memaksimalkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pengembangan rencana untuk mencapai tujuan bersama dengan mendayaupayakan seluruh sumber daya yang ada pada perusahaan dan mengkombinasikan menjadi keberhasilan atas tujuan yang diinginkan.

Pada Provinsi Jawa tengah sendiri jumlah *merchant* sampai dengan tahun 2023 yang sudah terakuisisi 37.447 untuk provinsi jawa tengah dari 29 kabupaten dan 6 kota dan yang tertinggi yaitu kota semarang dengan presentase sekitar 70%. Pihak KPwBI Jawa Tengah telah melakukan beberapa strategi/program terkait dalam hal memperkenalkan dan memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran QRIS antara lain :

Tabel 3.1

Program Kegiatan Perluasan QRIS KPwBI Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Kegiatan	Target/Sasaran	Strategi
1	QRIS Goes To School	Anak Sekolah Tk. SMA, Universitas	Memberikan edukasi terkait QRIS dan praktik <i>user experience</i> QRIS
2	Sejuta Pekerja Melek QRIS	Pekerja suatu pabrik	Memberikan edukasi terkait QRIS dan praktik <i>user experience</i> QRIS
3	Ngebis Ngagem QRIS	Pengguna transportasi umum, khususnya bus	Memberikan edukasi terkait QRIS dan potongan harga tiket bagi pengguna QRIS.
4	Parkir Ngagem QRIS	Pengguna Parkir Tepi Jalan Umum	Memberikan edukasi terkait QRIS dan potongan harga parkir bagi pengguna QRIS.
5	Ramadhan Manis pakai QRIS	Jamaah Masjid	Memberikan edukasi terkait QRIS dan mengadakan lomba kategori Masjid dengan donasi QRIS terbanyak.
6	Srawung Digital (antara lain pada event lari yang diselenggarakan oleh BI Jateng)	Pelaku UMKM, komunitas	Memberikan edukasi terkait QRIS dan praktik <i>user experience</i> QRIS
7	Kampanye QRIS	Masyarakat luas	Melakukan edukasi pada ekosistem non tunai, dengan program Mall Siap QRIS, Pasar Siap QRIS

Dalam pelaksanaan edukasi tersebut, Bank Indonesia selalu bersinergi dengan PJP, K/L seperti OJK dan pemerintah daerah. Media publikasi yang digunakan juga tidak harus secara langsung, namun sesuai kondisi yang

diperlukan seperti pada sosial media, baliho sampai menggunakan *influencer* jika dirasa perlu.

2.3.2 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Pendekatan berimbang direpresentasikan dalam visi sistem pembayaran Indonesia 2025 dan diwujudkan melalui lima inisiatif Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). Inisiatif yang kedua yakni mengembangkan sistem pembayaran ritel, hal ini dilakukan Bank Indonesia salah satunya dengan menstandarisasi serta mengintegrasikan semua sistem pembayaran berbasis QR Code di Indonesia melalui peluncuran QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019. QRIS diperlukan untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien. Standarisasi QR Code pada QRIS diperlukan untuk mencegah fragmentasi industri. QRIS ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi regulator dari satu pintu.

a. Pengertian QRIS

Kode QR (Quick Response) semakin sering dijumpai dalam transaksi keuangan. Berbentuk kotak dua dimensi hitam putih dengan kombinasi kotak-kotak kecil, QR berisi sejumlah kode yang memuat data (numerik, alfanumerik, kode biner, hingga simbol), yang informasinya dapat dibaca oleh sistem tertentu secara cepat dan tepat melalui proses pemindaian (*scan*).

Kode QR dikembangkan di Jepang oleh divisi Denso Wave dari perusahaan Denso Corporation. Denso menyempurnakan sistem barcode (kode batang, berbentuk deretan garis tebal-tipis dengan kombinasi tertentu) yang sering dijumpai pada kemasan produk. Barcode bersifat satu dimensi dan satu arah (horizontal) sehingga kemampuan menyimpan datanya terbatas, sementara QR bersifat dua arah (vertikal-horizontal) dengan tiga kotak penanda utama yang membuatnya dapat dipindai dari banyak sisi dengan cepat dan tepat. (Wendy Gouw, 2019)

Pada awalnya, QR yang dikeluarkan oleh satu dompet digital, harus dipindai dengan dompet digital yang sama. Akibat konsumen kesulitan dalam melakukan pembayaran, apabila merchant tersebut hanya memiliki satu QR tertentu. Akibat kesulitan tersebut, pemerintah turun tangan mendukung penuh revolusi sistem pembayaran digital Bank Indonesia yang diatur dalam undang-undang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Sebagai akibat tuntutan inovasi sistem terkini, Bank Indonesia (BI) membuat standarisasi kode QR, yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dengan tujuan untuk mempermudah transaksi uang elektronik.

Pada 17 Agustus 2019, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, QRIS resmi diterbitkan sebagai pemersatu QR code untuk semua aplikasi pembayaran yang menggunakan barcode. Ini dirancang untuk menstandarisasi semua aplikasi pembayaran yang menggunakan QR dengan pembayaran non-tunai berbasis QRIS. Oleh karena itu, QRIS dapat digunakan oleh setiap merchant yang

bekerjasama dengan PJP (Penyedia Jasa Pembayaran). Merchant yang bekerja dengan berbagai aplikasi dompet digital, seperti Ovo, GoPay, LinkAja, Dana, ShopeePay, dan lainnya, hanya menggunakan satu kode QR. Sehingga, apapun transaksi pembayaran yang menggunakan kode QR, konsumen bisa menggunakan dompet digital atau mobile banking manapun dengan mudah dan cepat.

Pada tanggal 01 Januari 2020, Bank Indonesia mewajibkan semua yang menyediakan transaksi pembayaran melalui non tunai wajib menggunakan barcode QRIS. Maka dari itu, konsumen yang menggunakan aplikasi seperti GoPay, ShopePay, OVO, LinkAja, M-Banking, Dana dan aplikasi lainnya, hanya memindai kode QRIS yang terletak di kasir. Dilansir dari beritasatu.com penggunaan dompet digital meningkat drastis dari tahun ke tahun. Saat ini dompet digital adalah metode pembayaran yang paling banyak dipakai di Indonesia dengan persentase lebih dari 40% penduduk Indonesia.

QRIS adalah pembayaran digital melalui server aplikasi uang digital seperti *e-wallet* dan *mobile banking*. Sudah diatur oleh Bank Indonesia dalam PADG No. 21/18/2019 mengenai implementasi standar internasional QRIS untuk bertransaksi (Silalahi & Tambunan, 2022).

Bank Indonesia dan Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI) bekerja sama untuk mengembangkan sistem pembayaran nontunai melalui QRIS. Dengan adanya QRIS ini diharapkan akan membawa transaksi pembayaran lebih mudah, efisien, dan lebih aman di Indonesia, lebih cepat juga mendorong UMKM untuk

lebih maju dan membantu pertumbuhan perekonomian. Dalam peluncuran QRIS menggunakan tema semangat UNGGUL, yakni singkatan dari UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung. Makna QRIS menurut Bank Indonesia, yaitu:

1. UNiversal, yaitu inklusi, untuk seluruh golongan masyarakat dapat menggunakan QRIS dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran didalam maupun diluar negeri.
2. GampanG, yaitu masyarakat dapat lebih mudah dan aman pada saat bertransaksi menggunakan QRIS
3. Untung, yaitu bertransaksi menggunakan QRIS lebih menguntungkan bagi penjual maupun pembeli karena transaksi lebih efisien dengan menggunakan satu QR code untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.
4. Langsung, yaitu bertransaksi menggunakan QRIS langsung terjadi, karena proses cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran pada sistem pembayaran (Srikaningsih, 2020).

a. Jenis-Jenis mekanisme QRIS

Terdapat 2 jenis mekanisme dalam transaksi QRIS antara lain *Push Payment* dan *Pull Payment*.

1. Push Payment

Metode *push payment* atau yang bisa disebut *Customer Presented Mode* (CPM), merupakan sistem transaksi yang menggunakan QR Code. Namun, pada metode ini QR Code akan discan oleh *customer* atau konsumen. Kemudian transaksi akan terjadi. Sistem pembayaran seperti ini

sendiri sudah digunakan oleh beberapa aplikasi pembayaran online. Seperti Go-Pay, Dana, Link Aja, OVO, dan lainnya.

2. Pull Payment

Metode ini sebenarnya kurang lebih sama seperti metode *Push Payment*. Namun, yang membedakan metode pembayaran ini sendiri adalah QR Code kita yang akan di scan oleh mesin khusus. Pada metode ini aplikasi penyedia layanan akan memberikan QR Code lalu QR Code tersebut kamu gunakan dengan cara di scan ke alat untuk melakukan transaksi. (Paramitha, Ak, dan Kusumaningtyas, 2020)

b. Jenis QR Code pada Merchant

Berdasarkan penjelasan BI, metode QRIS ini terdiri dari 2 media tampilan yang ada di merchant yang menampilkan kode QR yang kemudian di-scan menggunakan ponsel konsumen, yakni (Paramitha, Ak, dan Kusumaningtyas, 2020):

1. Statis

QR Code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain. QR Code yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga memerlukan input jumlah nominal.

2. Dinamis

QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC/ditampilkan pada monitor. QR Code yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi

pembayaran. QR Code telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar. Salah satu gambarannya, sistem QRIS ini sama seperti ATM Bersama, semua kartu ATM dari berbagai bank penerbit kartu bisa digunakan di ATM Bersama ini.

d. Manfaat QRIS

Manfaat QRIS digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ([Kanal dan Layanan \(bi.go.id\)](#)):

- 1) Bagi pengguna aplikasi pembayaran: *just scan and pay*
 - a) Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai dan cepat serta kekinian
 - b) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang dan terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
- 2) Bagi Merchant:
 - a) Meningkatkan branding dan Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun.
 - b) Kekinian dan lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
 - c) Mengurangi biaya pengelolaan kas dan terhindar dari uang palsu
 - d) Tidak perlu menyediakan uang kembalian dan transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
 - e) Terpisahnya uang untuk usaha dan personal dan memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.

- f) Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

e. Cara menjadi Pengguna dan Merchant QRIS

Mengutip dari laman Bank Indonesia, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan bagi merchant/toko yang hendak menggunakan QRIS pada tokonya serta bagi pengguna/pembeli, yaitu:

1. Sebagai Merchant

- a. Apabila belum memiliki rekening, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar *online* pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS;
- b. Lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut;
- c. Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP;
- d. PJSP akan mengirimkan sticker QRIS;
- e. Install aplikasi sebagai merchant QRIS;
- f. PJP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran;

2. Sebagai Pengguna

- a. Apabila belum memiliki akun, maka anda harus registrasi terlebih dahulu mengunduh aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang terdaftar (Contoh: Shopeepay, LinkAja, atau Gopay);
- b. Lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut;

- c. Isi saldo pada akun anda;
- d. Gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk di aplikasi anda;
- e. Buka aplikasi, cari icon scan/gambar QR/pay, scan QRIS yang ada pada merchant, masukan nominal, masukan PIN, klik bayar, cek notifikasi.

f. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Transaksi QRIS

Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi QRIS ini yaitu:

1) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

Berdasarkan PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP), penyelenggara jasa sistem pembayaran terdiri dari:

- a) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa; PJP menyelenggarakan aktivitas meliputi:
 - a. Penatausahaan Sumber Dana;
 - b. Penyediaan informasi Sumber Dana;
 - c. Payment initiation dan/atau acquiring services; dan
 - d. Layanan remitansi.

2) Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) merupakan pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan anggotanya. PIP menyelenggarakan aktivitas meliputi: kliring; dan/atau penyelesaian akhir bagi kepentingan anggota PIP. Selain dalam PBI SP, penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran juga diatur dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PBI PIP) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021. Dengan telah berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut, dilakukan reklasifikasi terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memiliki izin sebelum 1 Juli 2021, yang berdampak pada konversi izin dari izin yang dimiliki sebelumnya menjadi izin penyelenggara sebagaimana diatur dalam PBI SP.

3) Lembaga Switching

Lembaga yang menyelenggarakan switching dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang dimaksud dengan Switching adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.

4) Merchant Agregator

Pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

5) Pengelola NMR

National Merchant Repository yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (merchant). Fungsi sebagai pengelola NMR dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal diperlukan, terhadap pelaksanaan fungsi sebagai pengelola NMR, Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR.

6) Penerbit

Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang dimaksud Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.

7) Acquirer

Acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang dimaksud acquirer adalah pihak yang:

- a. Melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
- b. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

8) Pedagang (Merchant) QRIS

Penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam National Merchant Repository (NMR) untuk menerima Transaksi QRIS.

9) Pengguna QRIS

Pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS

2.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor

internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal (Rangkuty Fredi, 2011)

Menurut Pearce dan Robinson SWOT adalah singkatan dari kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*) intern perusahaan serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka.

Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan. Sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi.

2.2.4 Faktor-faktor dalam Analisis SWOT

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan merupakan sumber daya/kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan

relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan, kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok dan faktor-faktor lain.

Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan/kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak/kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang

mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Hal ini muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, penelitian dan pengembangan dan sebagainya.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam kondisi persaingan/regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli/pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya kekuatan tawar menawar dari pembeli/pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaharuan peraturan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan. Faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan

faktor kekuatan dan meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

2.2.5 Fungsi dan Peran Bank Indonesia dalam Elektronifikasi Pembayaran

Bank Indonesia telah menerbitkan *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang salah satu visinya mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital, baik melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Peningkatan efisiensi, kemudahan, dan inklusivitas yang didorong oleh integrasi ekonomi dan keuangan digital diharapkan akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya Bank Indonesia dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dilakukan melalui kebijakan dan program elektronifikasi “yang mencakup Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), Elektronifikasi Bantuan Sosial, dan Elektronifikasi Transportasi. Program ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui” peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi. Perubahan penggunaan instrumen dari tunai menjadi nontunai memiliki banyak keuntungan yaitu efisiensi dalam *cash handling*, lebih praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi, dan identifikasi perencanaan ekonomi yang lebih akurat.

Peran Bank Indonesia terkait elektronifikasi meliputi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka implementasi elektronifikasi selaras dengan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
2. Pelaksanaan sosialisasi kepada *stakeholders* eksternal mengenai implementasi program elektronifikasi meliputi regulasi dan kebijakan yang mendukung, serta publikasi materi edukasi kepada masyarakat terkait layanan transaksi nontunai melalui media dengan berkoordinasi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Kementerian/Lembaga terkait, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan pihak lainnya.
3. Pelaksanaan monitoring efektivitas implementasi program elektronifikasi “melalui survei, Forum Group Discussion (FGD) dan/atau on site visit ke lokasi.

Bank Indonesia terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai melalui 4 (empat) strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program pemerintah antara lain:

1. Fasilitasi model bisnis.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung.
3. Optimalisasi sumber daya lokal.
4. Edukasi dan monitoring.

2.2.7 Elektronifikasi Pemerintah Daerah

Implementasi *Cashless society* telah dinaungi oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang berdiri pada tahun 2010, asosiasi ini didirikan sebagai salah satu upaya memperkuat industri sistem pembayaran Indonesia agar dapat bersinergi dengan Bank Indonesia dalam pengembangan sistem pembayaran Indonesia. Hasil sinergi Bank Indonesia bersama ASPI diharapkan mampu mendorong peningkatan dan perluasan penggunaan non tunai. Penggunaan transaksi pembayaran elektronik di Indonesia terus ditingkatkan, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran terus bersinergi dan meminta komitmen berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri sistem pembayaran, maupun pihak lain melalui suatu kegiatan yang bersifat masif untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran dengan mengenalkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

KPwBI Provinsi Jawa Tengah dalam kesehariannya terus mendukung dan berperan aktif dalam implementasi GNNT ini sebagai salah satu tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam memberikan manfaat serta kemudahan masyarakat umum khususnya di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah. KPwBI Provinsi Jawa Tengah terus bersinergi antar stakeholder di wilayah provinsi Jawa Tengah, baik bekerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah serta kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Menurut Data Biro Pusat statistik, penduduk Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021 adalah berkisar 37 juta jiwa. Jumlah kepala keluarga yang diketahui di Dukcapil pada Juni 2021 berkisar 12 juta Kartu keluarga. Laju pertumbuhan penduduk: 1,17 persen. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Tengah mencapai 25,89 juta jiwa atau sekitar 69,54% dari total penduduk. Kelompok usia produktif ini berkisar dari 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, terdapat 13,09 juta jiwa atau sekitar 35,16% penduduk dengan usia tidak produktif. Rincian usia tidak produktif ini terdiri dari 8,46 juta jiwa atau sekitar 22,72% penduduk yang berasal dari kelompok usia 0- 14 tahun yang dianggap belum mampu produksi dan 4,63 juta jiwa atau sekitar 12,44% penduduk yang merupakan kelompok usia yang melewati batas usia produktif dan dianggap sudah seharusnya tidak bekerja lagi. (<https://JawaTengah.bps.go.id/publication/2023/09/26/28153193d14decf3ad8cc758/statistik-daerah-provinsi-jawa-tengah-2023.html>)

Dalam kaitannya untuk mewujudkan *cashless society* pada sistem pemerintahan daerah, Provinsi Jawa Tengah pun turun tangan dalam memfasilitasi tiap kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menerapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pada konteks pemerintah daerah, kebijakan nontunai pertama kali di uji cobakan di Pemerintah provinsi DKI pada tahun 2014 dan menjadi pionir dalam transaksi non-tunai di pemerintahan. Provinsi Jakarta konsisten dalam penerapan sistem non-tunai dan terus melakukan perkembangan, sehingga Gubernur Bank

Indonesia menunjuk Jakarta sebagai model percontohan dalam penggunaan transaksi non-tunai (Petriella, 2014). Tahun 2018, seluruh pemerintah daerah di Indonesia diharapkan telah mengadopsi kebijakan ini dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota Menteri Dalam Negeri juga mendukung kegiatan non-tunai ini dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang implikasi transaksi non-tunai pada Pemerintah Daerah provinsi dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non-tunai pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penerapan transaksi non-tunai merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. (Herlen at al., 2021)

Salah satu manfaat dari penerapan transaksi nontunai adalah pengendalian internal pengelolaan pada kas meningkat. Apabila kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan implementasi transaksi non-tunai dilakukan semaksimal mungkin, tentunya akan tercipta suatu prosedur pembayaran non-tunai yang terotorisasi dengan baik dan terdokumentasi dengan jelas. Jika daerah mau dan mampu mengembangkan lebih lanjut, seperti dengan membangun aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan maka terwujudlah sistem evaluasi, monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa dan juga transaksi keuangan dapat dipantau secara otomatis atau secara *realtime* oleh pimpinan.

Pengelolaan pemerintahan yang baik tentu menjadi tujuan dari semua pemerintah yang ada di Indonesia untuk dapat membangun daerah dan mensejahterakan rakyatnya. Adanya kebijakan non-tunai merupakan gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memudahkan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk membangun daerah yang *Clean and Good Governance*. *Good governance* menurut World Bank (1992) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama (Herlen, 2021)

Terdapat berbagai perangkat peraturan dan kebijakan yang dapat dijadikan landasan pemerintah daerah untuk mewujudkan *cashless society* yang menjadi focus inkusif keuangan saat ini, selain adanya Surat Edaran Menteri dalam Negeri, terdapat juga peraturan berupa Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Penataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diundangkan pada tahun 2018.

SPBE memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan menggunakan platform elektronik,

proses administrasi dapat dilakukan secara online, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk pengurusan dokumen dan permohonan layanan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan, melacak status permohonan, dan menerima pemberitahuan secara online, menghemat waktu dan tenaga baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Peran sistem pemerintah berbasis elektronik dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik juga tidak terbatas pada aspek fisik dan efisiensi semata. Sistem ini juga membawa manfaat tambahan, seperti peningkatan transparansi, partisipasi publik yang lebih aktif, dan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, dan anggaran pemerintah melalui portal pemerintah elektronik. Mereka juga dapat memberikan umpan balik, saran, dan pengaduan melalui platform elektronik, sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Herlen, 2021)

Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Penataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diundangkan pada tahun 2018, dengan tujuan mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan andal, serta meniadakan integrasi dan efisiensi. SPBE sebelumnya dikenal sebagai *egovernment* atau pemerintahan elektronik sebelum adanya perintah presiden. SPBE menawarkan informasi dan layanan kepada masyarakat Indonesia yang mencakup:

1. *Government to Citizen (G2C)* adalah kemitraan pemerintah masyarakat yang berupaya meningkatkan *engagement* dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pemerintahan
2. *Government to Business (G2B)* adalah klasifikasi ikatan atau koneksi antara pemerintah dengan dunia usaha. Hubungan ini sangat krusial dalam membangun hubungan koneksi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dengan tujuan memperlancar transaksi bisnis.
3. *Government to Government (G2G)* adalah semacam hubungan antara dua pemerintahan. Tujuan hubungan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi internasional sekaligus memfasilitasi dan memfasilitasi kolaborasi di antara negara-negara yang terlibat.
4. *Government to Employees (G2E)* adalah klasifikasi jaringan koneksi antara pemerintah dan pegawai. Target dari hubungan ini adalah guna mengembangkan serta meningkatkan kepiawaian dan kemakmuran pegawai atau pejabat pemerintah yang bekeja dinas di instansi pemerintah.
5. *Government to Non-Profit (G2N)* adalah jenis hubungan antara pemerintah dengan organisasi atau lembaga nirlaba seperti LSM, partai politik dan sejenisnya. Hubungan ini bermaksud agar organisasi atau lembaga nirlaba bisa dikelola dengan bagus sesuai amanat dan mandat untuk mencapai tujuannya.

Untuk mendorong upaya integrasi ekonomi dan keuangan digital maka pemerintah melalui BI melaksanakan kebijakan dan program elektonifikasi.

Program ini mencakup transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah (pemda), bantuan sosial dan transportasi. Maka tidak heran jika saat ini pengelolaan keuangan daerah sudah berbasis aplikasi *online* baik untuk transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran. Selain itu bantuan sosial juga saat ini diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tidak melalui perantara misalnya pihak kelurahan atau ketua RT. Saat ini penerima bantuan sosial memiliki rekening bank sebagai tempat penampungan bantuan sosial yang mereka terima. Selanjutnya sektor transportasi juga mulai diarahkan pada transaksi-transaksi non tunai, misalnya pembayaran biaya tol yang sudah menggunakan uang elektronik ataupun biaya transportasi terintegrasi yang juga menggunakan pola digital. Semua ini dilakukan selain untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat juga dapat meminimalkan potensi kerugian negara karena perbuatan orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.2.7 Peran dan kebijakan BI dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran digital

Bank Indonesia sebagai otoritas Sistem Pembayaran berperan dalam menyelenggarakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, maka upaya yang dilakukan untuk memasarkan suatu kebijakan kepada masyarakat luas dengan metode edukasi/sosialisasi. Di sisi lain, sebagai pelaku jasa sistem pembayaran, PJP harus

mendapatkan izin dari BI dalam penyediaan suatu jasa sistem pembayaran tersebut.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 mengatakan digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju. Bank Indonesia pun menunjukkan keseriusan dan dukungannya terhadap perkembangan inovasi teknologi digital sebagaimana telah menjadi misi ketiga Bank Indonesia saat ini, yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.

Sesuai Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 1999) dan sebagai salah satu bagian dari tiga pilar utama, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23. Tahun 1999 bahwa Bank Indonesia berwenang:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Definisi sistem pembayaran dari tugas Bank Indonesia tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 1999 bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Terdapat tiga unsur pokok yang terkandung dalam definisi sistem pembayaran sesuai bunyi pasal tersebut, yaitu:

- a. seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme;
- b. pemindahan dana; dan
- c. kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi.

Dari tiga unsur pokok di atas berarti bahwa pembayaran sama maknanya dengan pemindahan dana sehingga poin penting dari sistem pembayaran terletak pada terjaminnya pemindahan dana sebagai bentuk kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi.

Bank Indonesia menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) sebagai panduan arah kebijakan sistem pembayaran untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Kehadiran BSPI 2025 merupakan solusi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk menjawab tantangan kebijakan baru di era perkembangan teknologi digital. Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025) telah dirumuskan dalam BSPI 2025 sebagai target akhir (*end state*) dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia.

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran) sebagai salah satu bentuk reformasi pengaturan (*regulatory reform*) sistem pembayaran sekaligus menjadi payung hukum induk pengaturan dari standar nasional di bidang sistem pembayaran guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, mendorong 3i (integrasi, interkoneksi, interoperabilitas), keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran serta meningkatkan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Oleh karena itu, seluruh ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai standar di bidang sistem pembayaran yang telah diatur lebih dulu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran.

2.2.8 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang terletak di Jl. Tambak Aji Raya No. 5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, serta tugas operasional meliputi lalu lintas, penerangan jalan umum, angkutan, keselamatan sarana dan prasarana, pengujian kendaraan bermotor, parkir dan terminal. (Organisasi et al., 2021)

a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal Dan Tertib Di Kota Perdagangan Dan Jasa”

Visi tersebut di atas mengandung arti sebagai berikut :

- 1) Transportasi, dalam arti suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan Sumber Daya Manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;
- 2) Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota serta mampu mendukung pembangunan kota;
- 3) Kota Perdagangan, mengandung arti kota yang mendasarkan bentuk aktifitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan;
- 4) Kota jasa, sebutan kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa;

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan tersebut, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - 2) Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
 - 3) Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib;
 - 4) Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
 - 5) Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dinas dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsinya, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- 4) Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dinas;

- 5) Penyelenggaraan kerja sama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
 - 6) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
 - 7) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
 - 8) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
 - 9) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir termasuk ke dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, parkir ialah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir merupakan pembayaran

atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan per undang undangan yang berlaku. Di Kota Semarang retribusi parkir dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang berdasar Perda No 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir. Sedangkan subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

e. Landasan Hukum Parkir Tepi Jalan

1. Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
3. Perwal Kota Semarang No 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

f. Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tujuan diberlakukannya kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam bidang perparkiran kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor penerimaan retribusi parkir.

g. Peran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun peranannya antara lain:

- a. Bertanggung jawab secara teknis dan operasional atas kelancaran penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Kota Semarang baik dengan Sistem Parkir biasa maupun Sistem Parkir Berlangganan.
- b. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir untuk disetor ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengangkat, membina dan memberhentikan petugas atau juru parkir di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dibayarkan atas pelayanan atau manfaat khusus yang ditawarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pereorangan atau badan usaha (Kinasih, 2019). Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan fungsi retribusi tidak hanya sebagai sumber pendapatan saja, tapi sebagai pengendalian dan juga pengawasan pemerintah daerah dalam menilai serta mendukung pencapaian target yang sudah ditetapkan. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (UU HKPD No.1 Tahun 2022). Retribusi parkir menjadi sumber pendapatan daerah yang paling potensial saat ini (Kumalasari et al., 2019).

Masalah parkir merupakan polemik di Indonesia yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah dari unit kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya, dimana dilansir dari CNN Indonesia (2023) yang mengatakan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152.565.905 unit dengan 91.085.251 unit tersebar di Pulau Jawa sesuai dengan data Korps Lalu Lintas Polri. Hal ini dapat yang dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas lahan parkir dan volume kendaraan, sehingga menimbulkan permasalahan lain seperti parkir liar, gangguan lalu lintas, antrian panjang, kurangnya lahan parkir dan lain-lain (Sandra, 2020). Dimana permasalahan tersebut dapat mempengaruhi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilansir dari laman Kota Semarang (2022), retribusi parkir menjadi salah satu sumber PAD yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah.

Sebelum tahun 2021, parkir tepi jalan umum di Kota Semarang hanya menggunakan tunai dengan nilai pendapatan sebesar Rp1.974.238.000,00. Sedangkan sejak 2022, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp2.826.629.301, hal ini merupakan imbas dari penambahan kanal pembayaran QRIS untuk layanan parkir. Tahun 2023 PAD Kota Semarang terus meningkat menjadi Rp3.772.050.700 atau meningkat sebesar 190 % dibandingkan tahun 2021.

Penerapan e-parkir dilakukan bertahap dan dilakukan uji coba terlebih dahulu pada beberapa titik di Kota Semarang, di Jl. MT. Haryono, Jl. Agus Salim dan Jl. Wahid Hasyim. Mekanisme e-parkir yaitu Jukir menggunakan HP yang sudah ada QRIS parkir, pengguna parkir *scan* QRIS menggunakan *e-wallet/m-banking*, kemudian dana terdistribusi pada sore hari ke bank RKUD (55%), Jukir (45%) dan Penyedia Aplikasi/Aplikator (5%). Adapun pihak Aplikator yang bekerja sama dengan Dishub Kota Semarang saat ini yaitu Parkee, Parkkiran dan TSM. Dengan keberhasilan peningkatan PAD pada retribusi parkir ini, Dishub melakukan perluasan titik e-parkir di Kota Semarang, saat ini tercatat sudah ada 353 titik.

- h. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk Mendukung e-parkir
- 1) Membentuk Tim Pengawas Parkir Elektronik
 - 2) Penyuluhan Juru Parkir
 - 3) Pelatihan Juru Parkir
 - 4) Monitoring Transaksi Parkir
 - 5) Publikasi e-parkir
 - 6) Pemasangan rambu e-parkir

III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan analisis SWOT. Dalam metode ini terdapat kegiatan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Nasution mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan, yaitu untuk 1) memperoleh gambaran yang mendalam dan holistik tentang keseluruhan aspek dari subyek yang diteliti, 2) memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya, 3) memahami makna dan 4) memandang hasil penelitian sebagai spekulatif. Sedangkan menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Kembali pada definisi disini dikemukakan tentang peranan penting konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai suatu fenomena sosial. Peneliti memiliki keterkaitan yang kuat dengan sumber data, karena peneliti terjun langsung kelapangan dan menyatu dengan mereka sebagai sumber informasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Meleong yang

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada hakikatnya penelitian kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka secara mendalam dan *continue* sehingga hubungan peneliti dengan objek penelitian sangat dekat dan memiliki intensitas interaksi yang cukup tinggi. Kedekatan hubungan antara peneliti dengan sumber data merupakan media yang efektif untuk mendapatkan data penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan studi kasus. Metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa kini. Metode deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

Metode studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Begitu juga dengan pendapat Moh. Nazir yang menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Studi kasus merupakan metode penelitian yang sangat cocok digunakan manakala peneliti ingin mengungkapkan sesuatu yang bertolak dari

pertanyaan “bagaimana”, “mengapa” dan “apa’ atau “apakah”. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Dinas Perhubungan Kota Semarang Bidang Parkir, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini sehubungan dengan perumusan masalah adalah rencana untuk mendorong optimalisasi penggunaan QRIS pada retribusi parkir di Kota Semarang.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan suatu tujuan tertentu dengan melakukan wawancara terhadap para pihak atau orang yang dipandang lebih memahami dan mengetahui dalam penelitian ini. Dengan cara peneliti memilih pegawai Dinas Perhubungan yang telah menangani parkir tepi jalan umum di Kota Semarang, dengan masa dinas lebih dari 5 tahun. Selain itu, pejabat dan pegawai KPwBI Prov.Jateng yang menangani tentang sistem pembayaran non tunai, yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Dalam menentukan sumber data melalui

wawancara, maka dilakukan secara *purposive* yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

3.4. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian akan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan, jika penelitian itu dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, supaya penelitian yang peneliti lakukan dapat berjalan dengan baik guna mencapai hasil yang maksimal, maka dalam penelitian ini disusun langkah-langkah penelitian secara sistematis, yaitu:

a) Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan penelitian dengan terlebih dahulu melakukan pra penelitian terhadap perkembangan pembayaran QRIS pengguna parkir tepi jalan umum di kota Semarang. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data tentang pengembangan strategis dan prosedur yang tepat karakter yang akan dijadikan data dan informasi awal untuk memperkuat gambaran tentang bagaimana proses strategis tersebut.

b) Tahap Pelaksanaan

Setelah selesai tahap persiapan penelitian, dan persiapan-persiapan yang menunjang telah lengkap, maka peneliti terjun ke lapangan untuk pelaksanaan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menekankan bahwa instrumen yang utama adalah pegawai Dinas Perhubungan yang telah menangani parkir tepi jalan umum di Kota Semarang, serta pejabat dan pegawai KPwBI

Prov. Jateng yang menangani tentang sistem pembayaran non tunai (*key informan*). Mereka sebagai instrumen utama dibantu oleh pedoman observasi dan pedoman wawancara.

c) Tahap Penulisan Laporan Hasil Penelitian

Kegiatan penulisan laporan hasil penelitian ini dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. Dengan demikian pada tahap ini, peneliti berusaha mengorganisasikan data yang diperoleh dalam bentuk catatan dan dokumentasi. Tahap ini merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan refleksi terus menerus terhadap hasil penelitian, mengajukan berbagai bentuk pertanyaan analitis dan menulis catatan-catatan singkat sepanjang penelitian dilakukan.

3.5 Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian dari penelitian yang penting guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Keberhasilan penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh ketelitian, kelengkapan data dan catatan lapangan yang disusun oleh peneliti. Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dalam memperoleh data yang diperlukan. Penjelasan dari berbagai teknik tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Hal tersebut dilakukan dengan pengamatan langsung (observasi) terhadap situasi lingkungan, tempat, dan kegiatan implementasi Pendidikan karakter. Peneliti mengamati secara independen dan objektif, serta menganalisis apa saja yang terjadi di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui segala bentuk proses kegiatan yang berhubungan dengan implementasi pendidikan karakter, observasi tentang kondisi lokasi, kondisi awal dalam melakukan penelitian, dan lain-lain.

b. Wawancara

Pengertian wawancara dapat diungkapkan dari berbagai ahli yang ditulis oleh Satori dan Komariah , yaitu sebagai berikut:

1. Berg: membatasi wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk memperoleh informasi.
2. Sudjana: wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).
3. Esterberg menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat konstruksikan makna dalam satu topik tertentu.

Peneliti memakai teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui betul duduk permasalahan yang peneliti jadikan sebagai rumusan masalah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nasution bahwa dengan

wawancara mendalam ini diharapkan dapat diperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua responden dengan susunan kata dan urutan yang disesuaikan dengan ciri- ciri setiap responden.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka dan tertutup. Wawancara secara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dimana subyek yang diwawancarai secara sadar mengetahui kalau dirinya diwawancarai. Wawancara secara tertutup dilakukan dimana subyek penelitian tidak mengetahui kalau dirinya sedang diwawancarai, peneliti hanya bertanya seolah-olah hanya merupakan percakapan biasa dan santai.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, rekaman. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian. Dengan studi dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data atau informasi dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan.

3.6 Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya. Kegiatan analisis data dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul.

Dengan demikian pada tahap ini, peneliti berusaha mengorganisasikan data yang diperoleh dalam bentuk catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (Nasution) analisis data kualitatif yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga aktivitas, yaitu data *reduction*, data display, dan *conclusion drawing/ verification*. Ketiga rangkaian aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Semakin lama peneliti melakukan penelitian, data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, contohnya pendapat beberapa informan mengenai perkembangan penggunaan QRIS peneliti tampung dalam catatan penelitian, kemudian peneliti kembangkan sehingga menjadi susunan kalimat yang lebih jelas. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang terkumpul dan laporan lapangan yang tebal akan sulit dipahami, oleh karena itu agar dapat melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian harus diusahakan membuat berbagai macam matrik, uraian singkat, *networks*, *chart* dan grafik.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan atau ditampilkan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-aspek penelitian. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan data dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu supaya peneliti tidak terjebak dalam tumpukan data lapangan yang banyak, peneliti melakukan *display data*. *Display data* yang dilakukan lebih banyak dituangkan kedalam bentuk uraian singkat.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama, menarik kesimpulan sementara atau tentatif. Kedua, verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian.

3.7 Analisis Matrik SWOT

Untuk membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (*weakness*) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang (*opportunity*) yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (*threats*) yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu

1. Faktor eksternal ini mempengaruhi *opportunities and threats* (O dan T) Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industry (*industry environment*) dan lingkungan bisnis makro (*macro environment*), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan dan sosial budaya.
2. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths and weaknesses* (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya

manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT.

a. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST (*Strength-Threat*)

Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada.

c. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT (*Weakness-Threat*)

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman.

Tabel 3.2
Matriks SWOT

	<i>Strength</i> Daftar semua kekuatan yang dimiliki	<i>Weakness</i> Daftar semua kelemahan yang dimiliki
<i>Opportunities</i> Daftar semua peluang yang dimiliki	Strategi SO Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada	Strategi WO Atasi semua kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada
<i>Threat</i> Daftar semua ancaman yang dimiliki	Strategi ST Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman	Strategi WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman

Sumber: Fredy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis

Dengan matriks strategi SWOT tersebut, kemudian dilakukan *positioning*, untuk mengukur posisi QRIS yang merupakan salah satu metode pembayaran retribusi parkir. Dalam melakukan *positioning* harus dilakukan pembobotan atas aspek-aspek tertentu. Dalam melakukan pembobotan dan pemberian nilai dalam setiap aspek pada

analisis faktor internal (*Internal Faktor Evaluation*) dapat dilakukan dengan tahapan kerja sebagai berikut:

- a. Tentukan faktor-faktor penting dari kondisi internal suatu industry yang akan diteliti, kelompokkan ke dalam kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan. Kolom bobot merupakan Tingkat kepentingan tiap-tiap faktor, pembobotan 0,20 sangat penting, 0,15 penting, 0,10 cukup penting, 0,05 tidak penting dan jika dijumlahkan akan bernilai 1,00.
- b. Rating merupakan nilai kondisi internal di setiap organisasi. Nilai 4 untuk kondisi sangat baik, nilai 3 untuk kondisi baik, nilai 2 untuk kondisi biasa saja, dan nilai 1 untuk kondisi buruk. Faktor-faktor bernilai 3 dan 4 hanya untuk kelompok strengths, sedangkan bernilai 2 dan 1 untuk kelompok weaknesses.
- c. Nilai tiap-tiap faktor merupakan hasil kali antara bobot dan rating. Jika seluruh nilai dijumlahkan, maka dapat diketahui nilai IFE dari organisasi tersebut.

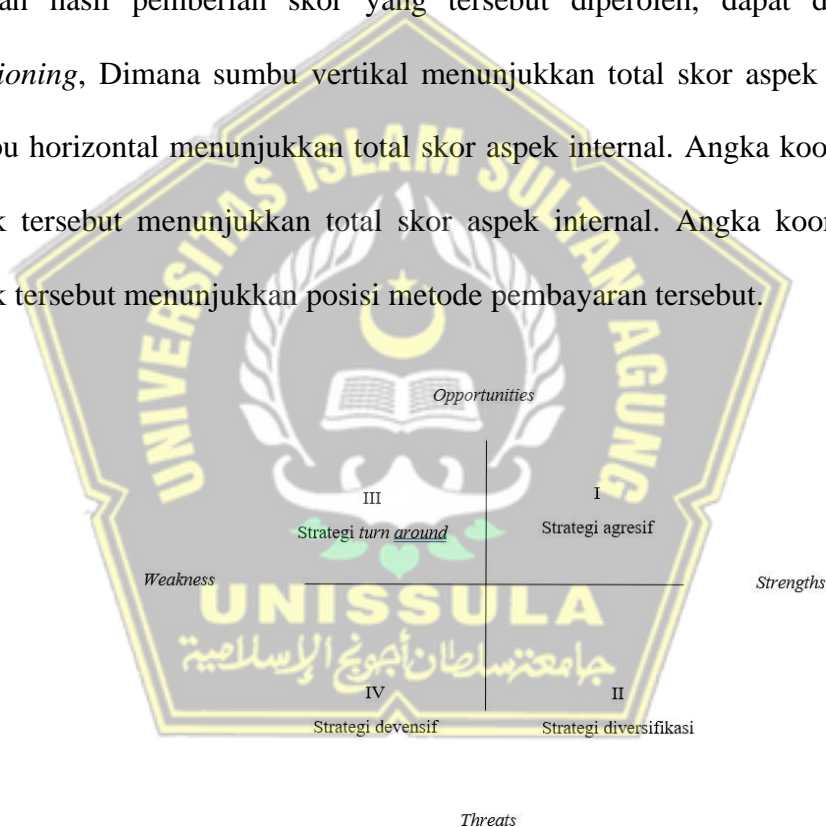
Jika telah menyelesaikan analisis faktor-faktor internal, hal yang sama juga akan dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal dengan cara yang sama

- a. Tentukan faktor-faktor penting dari kondisi eksternal suatu industri yang akan diteliti, kelompokkan ke dalam peluang-peluang dan ancaman-ancaman. Kolom bobot merupakan Tingkat kepentingan tiap-tiap faktor, pembobotan 0,20 sangat penting, 0,15 penting, 0,10 cukup penting, 0,05 tidak penting dan jika dijumlahkan akan bernilai 1,00.
- b. Rating merupakan nilai tanggap/antisipasi manajemen organisasi terhadap kondisi lingkungan tersebut. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif

(peluang yang semakin besar diberi rating 4 tetapi jika peluangnya kecil diberi rating 1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Jika ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1, tetapi jika ancamannya sedikit nilai ratingnya 4.

- c. Nilai tiap-tiap faktor merupakan hasil kali antara bobot dan rating. Jika seluruh nilai dijumlahkan, maka dapat diketahui nilai IFE dari organisasi tersebut.

Setelah hasil pemberian skor yang tersebut diperoleh, dapat dibuat grafik *positioning*, Dimana sumbu vertikal menunjukkan total skor aspek eksternal dan sumbu horizontal menunjukkan total skor aspek internal. Angka koordinat kedua aspek tersebut menunjukkan total skor aspek internal. Angka koordinat kedua aspek tersebut menunjukkan posisi metode pembayaran tersebut.



Dengan menggunakan matrik diagram analisis SWOT maka dapat digambarkan secara jelas mengenai ancaman dan peluang yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Kuadran 1 : merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2 : meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3 : perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan empat hingga tujuh Deputy Gubernur. Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya. ADG Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak, DPR-RI melakukan proses seleksi untuk mendalami visi, pengalaman, keahlian, dan integritas kandidat.

4.1.1 Status Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

4.1.2. Tugas Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tugas dan kewenangan bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pada akhir 2013 beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kaitan itu, Bank Indonesia diberikan mandat baru berupa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Mandat di bidang makroprudensial ini diamanatkan dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Mandat tersebut menegaskan peran Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mandat tersebut dilaksanakan melalui sinergi bauran kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

4.1.3 Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuantersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar utama, antara lain:

Gambar 4.1

Tiga Pilar Utama Bank Indonesia



(Sumber : www.bi.go.id)

4.1.4. Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia

Pencapaian pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran memerlukan sinergi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya. Untuk itu, pada 2018 Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis melalui penyempurnaan visi dan misi baru. Perubahan visi dan misi Bank Indonesia juga didorong oleh perubahan lingkungan strategis baik dari sisi eksternal maupun internal yang secara signifikan berdampak langsung terhadap pelaksanaan mandat Bank Indonesia. Visi dan misi baru Bank Indonesia menggambarkan dengan jelas bidang-bidang yang menjadi perhatian utama Bank Indonesia kedepan, dan

menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan mitra strategis lainnya.

A. Visi

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets.

B. Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi structural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.

7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

4.2 Analisis Faktor Strategis Internal dan Faktor Strategis Eksternal QRIS sebagai Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Semarang

Dari hasil identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal QRIS sebagai pembayaran retribusi parkir di Kota Semarang sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)

Faktor strategi internal terdiri dari:

a. Kekuatan/Strength

- S1. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang pertama kali tertuang dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- S2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. diantaranya mencakup kewenangan BI dalam Sistem Pembayaran.
- S3. Memfasilitasi Pemda yang akan menerapkan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- S4. Memberikan dukungan kepada Pemda yang telah menerapkan QRIS.

- S5. Memberikan wadah komunikasi antara Pemda dengan bank RKUD melalui TP2DD
- S6. Memiliki SDM yang ahli dalam bidang Sistem Pembayaran.
- S7. Memiliki akses untuk monitoring elektronifikasi Pemda dalam web www.kelola.p2dd.
- S8. Memiliki layanan pengaduan bagi nasabah/konsumen yang sedang dihadapkan pada permasalahan dalam penggunaan sistem pembayaran. Layanan ini dapat dihubungi oleh masyarakat melalui *hotline* dalam BICARA (131).
- S9. Memiliki informasi mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berizin yang dapat diakses melalui www.bi.go.id.
- S10. Berbagai macam jenis QRIS yang dapat digunakan oleh *merchant* dalam hal ini Pemda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- S11. Perluasan QRIS yang tidak hanya dapat digunakan di dalam negeri, namun juga dapat digunakan di luar negeri.
- S12. Retribusi parkir menjadi salah satu sumber PAD yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah
- S.13 Meningkatkan penerimaan pendapatan dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya serta upaya dalam meminimalisir kebocoran pajak.

S14. Akan tercipta suatu prosedur pembayaran non-tunai yang terotorisasi dengan baik dan terdokumentasi dengan jelas.

S15. Tersedianya *dashboard* untuk monitoring transaksi secara *realtime* oleh pimpinan.

b. Kekurangan/*Weakness* (W)

W1. Sangat tergantung pada *smartphone* dan sinyal

W2. Masalah teknis Ketika HP membaca QR/QR tidak terbaca dengan jelas

W3. Belum menjangkau masyarakat luas, khususnya di pedesaan

W4. Dalam pengisian/*top up* dompet elektronik, akan dikenakan tambahan biaya administrasi.

W5. Dalam proses transaksi QRIS khususnya *off us*, pemindahbukuan transaksi biasanya dilakukan pada akhir hari, sehingga baru diterima oleh merchant H+1.

W7. Ketidaksiapan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir terhadap metode pembayaran secara non-tunai melalui QRIS

4.2.2 Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

Faktor strategi eksternal terdiri dari:

a. Peluang/*Opportunity* (O)

O1. Semakin digital lingkungan sekitar

O2. Perkembangan teknologi informasi

O3. Pertumbuhan *merchant-merchant* baru yang cukup tinggi

- O4. *User friendly*/kemudahan dalam penggunaan
- O5. *Digital payment* memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan asli daerah
- O6. *Meningkatkan* efisiensi, mendukung pengelolaan, dan tata kelola keuangan
- O7. Lebih transparan serta akuntabilitas yang lebih akurat mengurangi kekeliruan dalam pencatatan perekonomian daerah
- O8. Menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap juru parkir sebagai juru parkir liar yang meminta biaya parkir tanpa memberikan karcis untuk pengguna jasa parkir

b. Ancaman/*Threat* {T}

- T1. *Digital cyber* yang semakin meningkat
- T2. Budaya Masyarakat yang sudah biasa menggunakan uang tunai
- T3. Keengganan golongan *baby boomers* untuk mengupdate teknologi.
- T4. Kualitas SDM/juru parkir
- T5 Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat/kesadaran masyarakat
- T6. Kemampuan teknologi yang belum merata
- T7. Sistem cukup rumit dan lama

4.2.3 Menentukan Matriks EFAS dan IFAS

Faktor-faktor strategis perusahaan yang didapat kemudian dimasukkan dalam bentuk tabel IFAS dan EFAS, sebelumnya dilakukan pembobotan terhadap masing-masing faktor strategi perusahaan. Pemberian bobot internal dan

eksternal didasarkan pada perhitungan kategori nilai terhadap setiap faktor strategis perusahaan, dari sini dilihat mana yang mempunyai pengaruh paling besar dan terkecil untuk pemberian penilaian. Fungsi dari pembobotan dan rating adalah untuk mengetahui faktor strategis perusahaan dan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat menjadi faktor kekuatan dan peluang, sedang dampak negatif menjadi kelemahan dan ancaman. Berikut tabel pemberian nilai dan bobot serta pemberian bobot dan rating.



Tabel 4.1
Penentuan Nilai Bobot IFAS

FAKTOR FAKTOR STRATEGIK INTERNAL				
No	. Kekuatan (Strengths)	Bobot	Rating	Nilai
1	Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang pertama kali tertuang dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.	0,047619	4	
2	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Diantaranya mencakup kewenangan BI dalam Sistem Pembayaran,	0,047619		
3	Memfasilitasi Pemda yang akan menerapkan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran pajak dan retribusi daerah.	0,047619		
4	Memberikan dukungan kepada Pemda yang telah menerapkan QRIS.	0,0476		
5	Memberikan wadah komunikasi antara Pemda dengan bank RKUD melalui TP2DD	0,0		
6	Memiliki SDM yang ahli dalam bidang Sistem Pembayaran.	0		
7	Memiliki akses untuk monitoring elektronifikasi Pemda dalam web www.kelola.p2dd			
8	Memiliki layanan pengaduan bagi nasabah/konsumen yang sedang dihadapkan pada permasalahan dalam penggunaan sistem pembayaran. Layanan ini dapat dihubungi oleh Masyarakat melalui hotline dalam BI (131)			
9	Memiliki informasi mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) be dapat diakses melalui www.bi.go.id			
10	Berbagai macam jenis QRIS yang dapat digunakan oleh mercha Pemda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.			
11	Perluasan QRIS yang tidak hanya dapat digunakan di dalam juga dapat digunakan di luar negeri.			
12	Retribusi parkir menjadi salah satu sumber PAD yang meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningka insfrastuktur dan mengembangkan potensi ekono			
13	Meningkatkan penerimaan pendapatan deng kesejahteraan kepada masyarakatnya serta kebocoran pajak			
14	Akan tercipta suatu prosedur pembayar baik dan terdokumentasi dengan jelas			
15	Tersedianya dashboard untuk moni pimpinan			
No				
1	Sangat tergantung pa			
2	Masalah teknis Ket			
3	Belum menjangk			
4	Dalam pengisi administrasi			
5	Dalam pro biasanya H+1.			
6	Keti pe			

Tabel 4.2
Penentuan Nilai Bobot EFAS

FAKTOR FAKTOR STRATEGIK EKSTERNAL				
No	Peluang (Opportunities)	Bobot	Rating	Nilai
1	Semakin digital lingkungan sekitar	0,066667	3,93	0,262
2	Perkembangan teknologi informasi	0,066667	3,76	0,250667
3	Pertumbuhan merchant-merchant baru yang cukup tinggi	0,066667	3,89	0,259333
4	User friendly/kemudahan dalam penggunaan	0,066667	3,95	0,263333
5	Digital payment memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan usaha	0,066667	3,95	0,263333
6	Meningkatkan efisiensi, mendukung pengelolaan, dan tata Kelola keuangan	0,066667	3,89	0,259333
7	Lebih transparan serta akuntabilitas yang lebih akurat mengurangi kekeliruan dalam pencatatan perekonomian daerah	0,066667	4	0,266667
8	Menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap juru parkir sebagai juru parkir liar yang meminta biaya parkir tanpa memberikan karcis untuk pengguna jasa parkir	0,066667	4	0,266667
	SUB TOTAL	0,533333		2,091333
No	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Nilai
1	Digital cyber yang semakin meningkat	0,066667	1,9	0,1267
2	Budaya Masyarakat yang sudah biasa menggunakan uang tunai	0,066667	2	0,1333
3	Keengganan golongan baby boomers untuk mengupdate teknologi.	0,066667	2	0,1333
4	Kualitas SDM/juru parkir	0,066667	2	0,1333
5	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat/kesadaran masyarakat	0,066667	2,5	0,1667
6	Kemampuan teknologi yang belum merata	0,066667	1,98	0,1320
7	Sistem cukup rumit dan lama	0,066667	1,87	0,1247
	SUB TOTAL	0,466667		0,9500
	TOTAL SKOR	1		3,0413

4.3 Matrik Analisis SWOT

Dari hasil analisis IFEM, EFEM dan profil kompetitif dapat dijadikan acuan untuk menyusun matrik analisis SWOT. Adapun matrik analisis SWOT disajikan sebagai berikut:

4.3.1 Matrik Internal – Eksternal (IE)

Matrik internal-eksternal yaitu Menyusun strategi yang terbagi ke dalam Sembilan sel. Tolak ukur yang digunakan adalah kekuatan-kelemahan internal dari IFEM untuk garis horizontal, peluang dan ancaman eksternal.

Gambar 4.2

Matrik Internal-Eksternal (IE)

Matrix IE	The IFEM Weight Score		
	Strong 3.0 to 4.0	Average 2.0 to 2.99	Weak 1.0 to 1.99
High 3.0 to 4.0	I Grow & Build	II Grow & Build	III Hold & Maintain
Medium 2.0 to 2.99	IV Grow & Build	V Hold & Maintain	VI Harvest/ Divest
Low 1.0 to 1.99	VII Hold & Maintain	VIII Harvest/ Divest	IX Harvest/ Divest

Dari matrik IE dapat disimpulkan bahwa Posisi Bank Indonesia terkait dengan transaksi QRIS berada pada segmen terbaik dimana bisnis kuat dan memiliki pasar menarik sehingga sangat patut untuk dipertahankan.

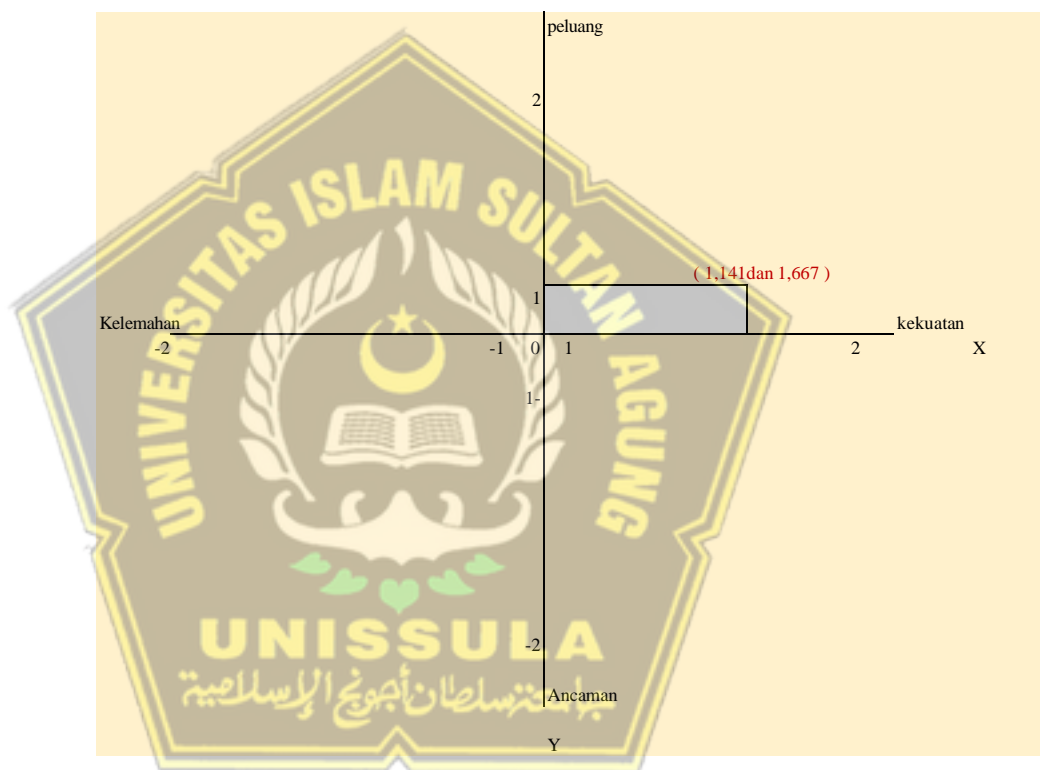
4.3.2 Matriks kuadran SWOT

Dasar penyusunan matrik kuadran adalah hasil analisis dari IFEM dan EFEM diatas. Secara prinsip antara matrik internal-eksternal (IE) dengan matrik kuadran

hampir sama, karena didalam matrik kuadran, pada masing-masing kuadran terdapat strategi yang harus dilakukan oleh organisasi/Perusahaan. Matrik kuadran SWOT disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3

Matrik kuadran SWOT



Berdasarkan gambar 4.2 metrik kuadran SWOT bahwa dimana rancangan strategi terkait dengan penguatan QRIS pada retribusi parkir di Kota Semarang yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi yang sangat menguntungkan, perusahaan memiliki kekuatan dan peluang karena ada pada kuadran I dengan strategi agresif.

Tabel 4.4

Analisis SWOT Antar Komponen dan Perumusan Faktor Kunci Keberhasilan Strategis

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	W1	W2	W3	W4	W5	W6
URAIAN	Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang pertama kali tertuang dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Diantaranya mencakup kewenangan BI dalam Sistem Pembayaran.	Memfasilitasi Penda yang akan menerapkan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran pajak dan retribusi daerah.	Memberikan dukungan kepada Penda yang telah menerapkan QRIS.	Memberikan wadah komunikasi antara Penda dengan bank melalui TP2DD	Memiliki SDM yang ahli dalam bidang Sistem Pembayaran.	Memiliki akses untuk monitoring elektronik Penda dalam web www.kelip2dd	Memiliki layanan pengadaan bagi nasabah konsumen yang sedang dihadapkan pada permasalahan dalam penggunaan sistem pembayaran. Layanan ini dapat dihubungi oleh Masyarakat melalui hotline dalam BICARA (131)	Memiliki informasi mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam hal ini Penda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.	Berbagai macam jenis QRIS yang dapat digunakan oleh merchant dalam hal ini Penda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.	Perluasan QRIS yang tidak hanya dapat digunakan di dalam negeri.	Retribusi parkir menjadi salah satu sumber PAD yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun juga dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah	Meningkatkan penerimaan pendapatan dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya serta upaya dalam meminimalisir kebocoran pajak	Akan tercipta suatu prosedur pembayaran non-tunai yang terotomatisasi dengan baik dan terdokumentasi dengan jelas	Tersedianya dashboard untuk monitoring transaksi secara realtime oleh pimpinan	Sangat tergantung pada smartphone dan sinyal	Masalah teknis ketika HP tidak dapat membaca QR	Belum menjangkau masyarakat luas, khususnya di pedesaan	Dalam proses pengisian top up dompet elektronik, akan dikenakan tambahan biaya administrasi.	Dalam proses transaksi QRIS khususnya off use, transaksi biasanya dilakukan pada akhir hari sehingga baru diterima oleh merchant H-1.	Ketidaksiapan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir terhadap metode pembayaran secara non-tunai melalui QRIS
O1	Semakin digital lingkungan sekitar			K2		K3															
O2	Perkembangan teknologi informasi						K4	K5				K1									
O3	Pertumbuhan merchant-merchant baru yang cukup tinggi											K6									K15
O4	User friendly/kemudahan dalam penggunaan																				K17
O5	Digital payment memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan usaha																				
O6	Meningkatkan efisiensi, mendukung pengelolaan, dan tata kelola keuangan																				
O7	Lebih transparan serta akuntabilitas yang lebih akurat												K8	K7							
O8	Menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap jura parkir sebagai jura parkir liar yang meminta biaya parkir tanpa memberikan karcis untuk pengguna jasa parkir												K9								
T1	Digital cyber yang semakin meningkat																				
T2	Budaya Masyarakat yang sudah biasa menggunakan uang tunai															K11	K12	K13	K14		
T3	Keengganan golongan baby boomers untuk mengupdate																				
T4	Kualitas SDM/Jura Parkir					K10															
T5	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat/kesadaran masyarakat																				
T6	Kemampuan teknologi yang belum merata																				
T7	Sistem cukup rumit													K16							

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada tabel 4.3 maka faktor kunci keberhasilan strategis yang bisa digali adalah sebagai berikut:

K1 Mendukung pemda untuk memperluas penggunaan QRIS salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik

K2 Memberikan stimulus kepada masyarakat yang menggunakan QRIS dalam pembayaran retribusi paket

K3 Dapat menjadi konsultan apabila pemda membutuhkan saran dalam penerapan elektronifikasi

K4 Monitoring pencapaian pemda melalui dashboard kelola.tp2dd dan dapat digunakan untuk mendorong pemda yang belum implementasi QRIS

K5 Dengan adanya layanan pengaduan konsumen dari otoritas, masyarakat tidak perlu takut dengan dalam penggunaan QRIS

K6 Dengan makin banyaknya merchant yang menggunakan QRIS, diharapkan dapat terbentuk ekosistem digital yang nantinya masyarakat juga akan ikut terbiasa dalam penggunaan QRIS ini

K7 Fasilitas yang disajikan oleh QRIS diantaranya dapat dipantau secara real time oleh pemangku kepentingan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

K8 Teknologi yang ada di dalam QRIS salah satunya adalah seluruh transaksi akan secara otomatis tercatat secara rinci, sehingga menghindari terjadinya kesalahan dalam laporan

- K9 Dengan adanya layanan e-parkir, diharapkan masyarakat akan lebih percaya retribusi langsung masuk ke pendapatan Pemda, tidak di kantong orang yang tidak berhak
- K10 Dengan maraknya digital cyber diharapkan Dishub dan BI bersinergi untuk mensosialisasikan keamanan bertransaksi dengan QRIS dan juga tips kehati-hatian dalam bertransaksi
- K11 Untuk mengatasi kendala sinyal, pihak Dishub diharapkan menyediakan penguat sinyal/wifi di sekitar lokasi e-parkir
- K12 Untuk mengatasi adanya kendala QR yang tidak terbaca, maka pihak Dishub menyediakan QRIS yang terpasang di hp juru parkir sehingga dapat lebih jelas terbaca
- K13 Untuk menjangkau masyarakat di pedesaan, sebaiknya Dishub melakukan uji coba pada area yang cukup sulit dijangkau di Kota Semarang
- K14 Masyarakat disarankan untuk penggunaan mbaking pada saat bertransaksi QRIS, krna tidak ada tambahan biaya
- K15 Area e-parkir lebih banyak menggunakan lahan toko/penjual, dengan adanya perluasan QRIS yang masif diharapkan toko/penjual sudah menyediakan layanan pembayaran QRIS, sehingga terbentuk ekosistem non tunai di area tersebut
- K16 Banyak penyedia jasa pembayaran yang telah memiliki sistem untuk membantu Pemda dalam mengimplementasikan elektronifikasi sesuai dengan kebutuhan Pemda

K17 Kemudahan dalam penggunaan QRIS yang user friendly diharapkan mampu diikuti oleh juru parkir maupun masyarakat

Strategik Pengembangan

Berdasarkan analisis diatas, strategic pengembangan untuk QRIS pada juru parkir yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan kanal pembayaran parkir memudahkan pengguna parkir yang tidak punya uang kecil yang tentunya juga memudahkan jukir tak perlu repot mencari uang kembalian
- b. BI membuat program "Parkir Ngagem QRIS" yaitu dengan memberikan diskon bagi pengguna parkir yang bertransaksi menggunakan QRIS.
- c. BI sebagai anggota T2PDD memberikan saran dan masukan kepada Pemda dalam penerapan elektronifikasi
- d. Pemda setidaknya setahun 2 kali melakukan input data pada kelola.tp2dd, hal ini menjadi acuan BI untuk mendorong Pemda yang belum menerapkan QRIS
- e. Sosialisasi terkait dengan layanan pengaduan konsumen yang ada di BI, dapat dilakukan melalui pemasangan billboard maupun media sosial
- f. BI bersama dengan perbankan terus memperluas *merchant* QRIS
- g. Setiap *merchant* QRIS difasilitasi oleh *dashboard* transaksi QRIS yang dapat dipantau secara *realtime*
- h. *Dashboard* yang telah tersedia otomatis menyajikan transaksi secara rinci dan minim kesalahan
- i. Meminimalisir adanya parkir liar

- j. Sosialisasi terkait *digital cyber* rutin dilakukan oleh BI sebagai otoritas sistem pembayaran, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik
- k. Dishub dapat bekerjasama dengan Diskominfo untuk penyediaan penguat sinyal/wifi pada lokasi e-parkir
- l. QRIS yang digunakan oleh juru parkir berupa QRIS statis yang terpasang pada HP juru parkir
- m. Uji coba dapat dilakukan Dishub bekerjasama dengan BI, untuk melakukan perluasan QRIS pada daerah yang cukup sulit dijangkau di Kota Semarang
- n. Dishub dengan BI dapat membuat *flyer* yang berisi himbauan penggunaan mbanking yang kemudian ditempel pada beberapa titik e parkir
- o. BI bersama dengan perbankan terus memperluas *merchant* QRIS
- p. Dishub telah bekerjasama dengan Parkee, TSM dan Perparkiran dalam implementasi e parkir.
- q. Dishub bersama BI telah dilakukan sosialisasi/edukasi dan penyuluhan kepada Juru Parkir dan diharapkan dapat diterapkan kepada pengguna parkir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal.

Analisa SWOT merupakan sebuah alat analisis yang cukup baik, efektif, efisien serta sebagai alat yang cepat dalam menemukan kemungkinan- kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan awal program-program inovasi baru di dalam perusahaan, disamping dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam organisasi atau komite bahkan individu. Juga sebagai alat bantu untuk memperluas dan mengembangkan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan.

Dengan menggunakan faktor-faktor strategis yang ada pada KPwBI Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat mengetahui strategi yang dapat diterapkan, antara lain:

Kekuatan:

1. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang pertama kali tertuang dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. diantaranya mencakup kewenangan BI dalam Sistem Pembayaran.
3. Memfasilitasi Pemda yang akan menerapkan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran pajak dan retribusi daerah.
4. Memberikan dukungan kepada Pemda yang telah menerapkan QRIS.
5. Memberikan wadah komunikasi antara Pemda dengan bank RKUD melalui TP2DD
6. Memiliki SDM yang ahli dalam bidang Sistem Pembayaran.
7. Memiliki akses untuk monitoring elektronifikasi Pemda dalam web www.kelola.p2dd.
8. Memiliki layanan pengaduan bagi nasabah/konsumen yang sedang dihadapkan pada permasalahan dalam penggunaan sistem pembayaran. Layanan ini dapat dihubungi oleh masyarakat melalui *hotline* dalam BICARA (131).

9. Memiliki informasi mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berizin yang dapat diakses melalui www.bi.go.id.
10. Berbagai macam jenis QRIS yang dapat digunakan oleh *merchant* dalam hal ini Pemda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
11. Perluasan QRIS yang tidak hanya dapat digunakan di dalam negeri, namun juga dapat digunakan di luar negeri.
12. Retribusi parkir menjadi salah satu sumber PAD yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah
13. Meningkatkan penerimaan pendapatan dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya serta upaya dalam meminimalisir kebocoran pajak.
14. Akan tercipta suatu prosedur pembayaran non-tunai yang terotorisasi dengan baik dan terdokumentasi dengan jelas.
15. Tersedianya *dashboard* untuk monitoring transaksi secara *realtime* oleh pimpinan.

Peluang:

1. Semakin digital lingkungan sekitar
2. Perkembangan teknologi informasi
3. Pertumbuhan *merchant-merchant* baru yang cukup tinggi
4. *User friendly*/kemudahan dalam penggunaan

5. *Digital payment* memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan asli daerah
6. *Meningkatkan* efisiensi, mendukung pengelolaan, dan tata kelola keuangan
7. Lebih transparan serta akuntabilitas yang lebih akurat mengurangi kekeliruan dalam pencatatan perekonomian daerah
8. Menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap juru parkir sebagai juru parkir liar yang meminta biaya parkir tanpa memberikan karcis untuk pengguna jasa parkir

Dengan mengetahui kekuatan dan peluang yang ada, dapat ditetapkan strategi yang paling tepat untuk mengetahui kelemahan dan ancaman yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan:

1. Dalam penerapan perluasan e-parkir di Kota Semarang, Dishub dapat bekerjasama dengan Diskominfo untuk penyediaan penguat sinyal/wifi pada lokasi e-parkir. Selain itu untuk uji coba implementasi e-parkir di daerah yang sulit dijangkau di Kota Semarang, Dishub dapat berkolaborasi dengan Bank Indonesia.
2. Untuk Bank Indonesia, harus melakukan sosialisasi lebih gencar terkait QRIS dimana masyarakat diberikan literasi bahwa menggunakan QRIS merupakan solusi terbaik baik pembayaran maupun laporan keuangan. Selain itu, untuk terus meningkatkan volume transaksi QRIS dapat dilakukan stimulus dengan pemberian diskon khusus di momen tertentu, seperti misalnya hari ulang tahun kemerdekaan.

3. Kepada masyarakat umum, kesadaran atas pentingnya digitalisasi pembayaran agar kita terhindar dari penipuan maupun pengedaran uang palsu yang sekarang marak beredar. Selain itu, dengan adanya layanan pengaduan konsumen yang dimiliki oleh BI maupun penyedia jasa pembayaran maka Masyarakat tidak perlu ragu untuk bertransaksi secara digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi dkk. April 2023. Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis Vol 3 No 1 hal 80-89
- Anggraeni, Mela Asoka dan Argo Pambudi. 2024. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai melalui Penerapan QRIS dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta. Journal of Public Policy and Administration Research Vol 9 No 2
- Ardiyansyah Riyans dan Nurjannatul Hasanah. 2018. Analisis Kebijakan, Strategi dan Analisis SWOT Pengelolaan Usaha Rumput Laut Nelayan Daerah Pesisir Pantai Amal Kota Tarakan. Jurnal Metris Vol 19 No 2
- Bank Indonesia. 2024. Fungsi Utama Bank Indonesia. bi.go.id. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/default.aspx>
- Cnbc Indonesia. 2019. Qris Ikhtiar mendobrak integrasi sistem pembayaran digital. Cnbc.com. <https://www.cnbciindonesia.com/opini/20191115130944-14-115542/qris-ikhtiar-mendobrak-integrasi-sistem-pembayaran-digital>. 2019
- Darwiyani, Amelia Putri, et al., 2023. Fenomena Penggunaan QRIS dalam Pembanguana Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Universitas Ahmad Dahlan.

Dewi, Lely Savitri. 2018. Kajian Independensi Bank Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan Uubi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen, Coopetition, Program Studi Magister Manajemen.

Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi. Alfabeta

Hutami A. Ningsih dkk. 2021. Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 1

Herlen, Astri Tania et al. 2021. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

Hermawan, Sigit dan Sriyono. (2020). Manajemen Strategi Dan Risiko. Sidoarjo: UMSIDA Press

Ihsan, Ali. 2020. Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan Sistem Transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS). Jurnal UIN Antasari

Khofifah Nur. 2023. Analisa Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan resiko terhadap Keputusan Menggunakan QRIS sebagai alat Pembayaran pada Usaha Mikro di Kabupaten Pacitan. Jurnal IAIN Surakarta

Kompasiana.com. 2024. Biaya cetak uang. Kompasiana.com.
<https://www.kompasiana.com/harisrecht/64fbe7cf08a8b547a51efe12/biaya-cetak-uang-mahal-sayangilah-dia>

- Kuncoro, Mudraja. 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif.
Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Mintarsih. 2013. Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik
- Purba, Daniel dan Samuel Panjaitan. 2024. Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas
Sistem Keuangan. Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
- Puspitasari, Ajeng Awliya dan Imam Salehudin. 2022. Journal of Marketing Innovation
- Prasetyo, Bambang D dan Nufian S Febrianti. (2020). Strategi Branding Teori Dan
Perspektif Komunikasi Dalam Bisnis. UB Press.
- Prastowo, Andi. (2010). Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta: Diva Press
- Rachmadi, Usman. 2007. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran.
Jurnal Unair
- Rangkuti, Freddy. (1998). Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia
Pustaka Utama
- Ritonga Zuriani. (2020). Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: CV
Budi Utama
- Robinso, Pearce. 2011. Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan
Pengendalian.
- Shofiyullah. (2023). Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan Pasca
Pandemi Covid-19 Dengan Metode Analisis SWOT. (Magister, Universitas
Sultan Agung)

Silalahi, Purnama Ramadani dan Khairina Tambunan. 2022. Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Sofania Bella Lulu dan Palti MT Sitorus. 2023. Analisis Minat Pengguna Fitur QRIS Sebagai Media Pembayaran Pajak PBB Online (FINTECH) Menggunakan Teori Difusi Inovasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Bandung). Jurnal Mirai Management

Sriekaningsih, A. (2020). QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0(I). CV Andi Offset.

Syamsir, Torang. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx>

<https://smart-money.co/edukasi/evolusi-sistem-pembayaran-dan-kemudahan-yang-ditawarkannya>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang#Uang_Kuasi

<https://www.romadecade.org/sejarah-uang/>

<https://www.finansialku.com/uang-kartal/>

<https://jateng.bps.go.id/publication/2023/09/26/28153193d14decf3ad8cc758/statistik-daerah-provinsi-jawa-tengah-2023.html>